

**JADWAL**

Tanggal Efektif	17 Oktober 2016	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	9 November 2017
Masa Penawaran	30 Oktober – 3 November 2017	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	10 November 2017
Tanggal Penjatahan	7 November 2017		

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT BFI FINANCE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.**



**PT BFI FINANCE INDONESIA TBK**

**Kegiatan Usaha Utama**

Pembiayaan Investasi, Modal Kerja dan Multi Guna

Berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat**  
 BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
 Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
 Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
 Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500  
 Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758  
 Website: www.bfi.co.id

**Cabang**  
 211 Kantor Cabang dan 110 gerai di berbagai wilayah di Indonesia

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA  
 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)  
 (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)**

**PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2016  
 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**DAN**

**PADA TAHAP KEDUA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2017  
 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP III TAHUN 2017  
 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP835.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp335.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 19 November 2018.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 9 November 2019.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri C yaitu pada tanggal 9 November 2020.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG PERFORMING, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGGAK DALAM WAKTU LEBIH DARI 90 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN Masing-masing PIUTANG TERSEBUT, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI RISIKO USAHA.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia (“Fitch”):

AA-(iii) (*double A minus*)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**



**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

**WALI AMANAT**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada Tanggal 30 Oktober 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. Corp/Sjn/L/VIII/16-0158 tanggal 22 Agustus 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-588/D.04/2016 pada tanggal 17 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu memiliki kesamaan 1 (satu) Komisaris. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

**PENAWARAN UMUM "OBLIGASI BERKELANJUTAN III" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	ii
Ringkasan .....	viii
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	15
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	16
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	18
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	34
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	34
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	34
3. Pengurus dan Pengawas .....	34
4. Perjanjian Penting Dan Komitmen .....	34
5. Sumber Daya Manusia .....	42
6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawas Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan .....	43
7. Keterangan Mengenai Entitas Anak .....	44
8. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan .....	45
9. Keterangan Tentang Aset Tetap .....	48
10. Asuransi .....	53
11. Hak Kekayaan Intelektual .....	54
12. Kantor Cabang .....	54
13. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha .....	67
14. Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai ( <i>Loan Loss Coverage</i> ) .....	68
15. Tingkat Kesehatan Perseroan .....	69
16. Prospek Usaha .....	69
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	71
VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	72
VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	77
IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	81
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	82

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran** : Berarti KSEI berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal.
- Bapepam** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Bapepam dan LK** : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bunga Obligasi** : Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Bursa Efek atau BEI** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dokumen Emisi** : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka penawaran umum ini.
- Efek** : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

<b>Emisi</b>	: Berarti suatu penerbitan Obligasi untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan.
<b>Force Majeure</b>	: Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan.
<b>Hari Bursa</b>	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
<b>Hari Kalender</b>	: Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.
<b>Hari Kerja</b>	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<b>Informasi Tambahan</b>	: Berarti Informasi Tambahan atas Prospektus yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
<b>Jaminan</b>	: Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
<b>“Joint Financing”</b>	: berarti kerja sama antara perbankan dan Perseroan dalam hal memberikan pinjaman untuk pembiayaan secara bersama-sama.
<b>Jumlah Terutang</b>	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
<b>Kantor Cabang</b>	: Berarti unit jaringan pelayanan Perseroan.
<b>Konfirmasi Tertulis</b>	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
<b>Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR)</b>	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
<b>KSEI</b>	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
<b>Kustodian</b>	: Berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
<b>Manajer Penjatahan</b>	: Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
<b>Masyarakat</b>	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat

tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

- Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp335.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 19 November 2018 untuk Obligasi Seri A, 9 November 2019 untuk Obligasi Seri B dan 9 November 2020 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Fitch** : Berarti PT Fitch Ratings Indonesia
- Pemegang Obligasi** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari:
1. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau
  2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
- Penawaran Umum** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penawaran Umum Berkelanjutan** : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan tingkat bunga tetap, dengan mengacu kepada Peraturan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

- Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III** : Kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 jumlah pokok Obligasi sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp335.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Dengan mengacu ke Peraturan OJK No. 36./POJK/04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2** : Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/Bl/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4** : Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianan Atas Efek Bersifat Utang.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.3** : Berarti Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01 (satu) Agustus 2008 (dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11** : Berarti Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 7** : Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- Peraturan OJK No. 9** : Berarti Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 30** : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- Peraturan OJK No. 34** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 36** : Berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
- Perjanjian Agen Pembayaran** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 24 tanggal 20 Oktober 2017 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Agen Pembayaran berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi** : Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 No. 22 tanggal 19 Oktober 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Perwaliamanatan** : Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Wali Amanat yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 No. 20 tanggal 19 Oktober 2017 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-031/OBL/KSEI/1017 tanggal 20 Oktober 2017 dan dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perseroan** : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Pokok Obligasi** : Berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang pada Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Rp835.000.000.000 (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp335.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah),

berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
- RUPO** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Satuan Pindahbukuan** : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Sertifikat Jumbo Obligasi** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
- Tanggal Emisi** : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi** : Berarti tanggal jatuh tempo seluruh Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Tanggal Pembayaran** : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi** : Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi, berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- UUPM** : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya.
- Wali Amanat** : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat tertanggal 14 Agustus 1996, Nomor: 10, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

## Ringkasan

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

### ▪ Umum

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Tahap II tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia No. 1 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0134738 tanggal 9 Mei 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060009.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017, yang telah mengambil keputusan untuk menyetujui perubahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dengan ratio 1 : 10 (satu dibanding sepuluh) yaitu dari nilai saham masing-masing

### ▪ Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Laporan Keuangan Interim Perseroan per 30 September 2017, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Nilai Penuh Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,81
Masyarakat di bawah 5%	8.129.133.960	203.228.349.000	50,91
<b>Sub-total</b>	<b>14.964.383.620</b>	<b>374.109.590.500</b>	<b>93,72</b>
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.967.115.620</b>	<b>399.177.890.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.032.884.380</b>		

### ▪ Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan perbandingan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
Jumlah aset	14.688.112	12.476.256	11.770.414
Investasi neto sewa pembiayaan-bersih	8.272.361	7.121.175	5.209.847
Piutang pembiayaan konsumen-bersih	5.263.117	4.462.184	4.688.156
Aset tetap – bersih	427.178	414.143	427.875
Pinjaman yang diterima	6.132.765	4.690.939	5.636.699
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.390.137	2.965.295	1.681.116
Jumlah liabilitas	10.099.666	8.221.572	7.751.311
Jumlah ekuitas	4.588.446	4.254.684	4.019.103
Pendapatan	1.885.498	3.227.109	2.830.617
Beban	1.227.020	2.202.146	1.995.123
Laba sebelum pajak penghasilan	658.478	1.024.963	835.494
Laba periode / tahun berjalan	525.856	798.365	650.288
Laba sebelum pajak penghasilan / rata-rata aset (%)**	9,7	8,5	7,8
Laba periode/tahun berjalan / rata-rata ekuitas (%)***	23,8	19,3	17,1
Rasio utang bersih terhadap ekuitas (Gearing Ratio) (x) ****	2,0	1,8	1,6
Rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap piutang yang dikelola (%)	1,09	0,91	1,33
Rasio penyisihan kerugian penurunan nilai terhadap piutang yang dikelola (%)	1,8	1,4	1,5

Ket: \*) Tidak diaudit

\*\*) Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 30 Juni 2017 di setahunkan

\*\*) Laba periode berjalan untuk periode 30 Juni 2017 di setahunkan

\*\*) (Pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan-bersih – kas dan setara kas) / Ekuitas

#### ▪ Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 (“Obligasi”).
Jumlah Nilai Obligasi	:	Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> )
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;</li> <li>• Seri B: 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.</li> <li>• Seri C: 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi</li> </ul>
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seri A: 6,75% (enam koma tujuh lima persen);</li> <li>• Seri B: 7,25% (tujuh koma dua lima persen); dan</li> <li>• Seri C: 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen)</li> </ul>
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Rencana Penggunaan Dana	:	Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Jaminan	:	<p>Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yang belum jatuh tempo dan yang pembayaran angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;</li> <li>- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.</li> </ul>
Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Hasil Pemeringkatan	:	AA <sub>(-id)</sub> ( <i>double A minus</i> ) dari Fitch.
Pembelian Kembali ( <i>buy back</i> )	:	Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1(satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, kecuali apabila jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

▪ Obligasi yang telah diterbitkan Perseroan

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang
Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp200 miliar	12,50%	Baa1.id	2 tahun	Telah lunas	-
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp160 miliar	12,00%	idA-	370hr	Telah lunas	-
		12,75%		18 bulan	Telah lunas	-
		13,25%		24 bulan	Telah lunas	-
Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp420 miliar	9,00%	A(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		10,25%		24 bulan	Telah lunas	-
		11,00%		36 bulan	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012	Rp575 miliar	7,00%	A(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		8,00%		2 tahun	Telah lunas	-
		8,50%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	Rp625 miliar	7,50%	A+(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		8,50%		2 tahun	Telah lunas	-
		9,00%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Rp500 miliar	10,50%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		11,00%		2 tahun	Telah lunas	-
		11,50%		3 tahun	Telah lunas	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Rp1.000 miliar	9,875%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		10,50%		2 tahun	Telah lunas	-
		10,875%		3 tahun	19 Maret 2018	Rp550 miliar
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Rp1.000 miliar	9,75%	AA-(idn)	370 hari	Telah lunas	-
		10,25%		2 tahun	25 Februari 2018	Rp142 miliar
		10,75%		3 tahun	25 Februari 2019	Rp658 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Rp1.000 miliar	8,100%	AA-(idn)	370 hari	5 November 2017	Rp317 miliar
		8,800%		3 tahun	25 Oktober 2019	Rp550 miliar
		9,100%		5 tahun	25 Oktober 2021	Rp133 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	Rp1.000 Miliar	8,00%	AA-(idn)	370 Hari	12 Maret 2018	Rp540 miliar
		9,15%		3 tahun	2 Maret 2020	Rp460 miliar
<b>Total Jumlah Obligasi Terhutang</b>						<b>Rp3.350 miliar</b>

Jumlah total seluruh Obligasi yang masih terhutang hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp3.350.000.000.000,- (tiga triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

## I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")**

**PADA TAHAP I PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR  
RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**DAN**

**PADA TAHAP II PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR  
RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,  
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP III TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI  
SEBESAR RP835.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp335.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 19 November 2018.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 9 November 2019.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri C yaitu pada tanggal 9 November 2020.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP IV  
dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.**

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia ("Fitch"):  
AA-(rd) (Double A minus)

**Kegiatan Usaha Utama**

Pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna  
Berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat:**

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)

**Cabang:**

211 Kantor Cabang dan 110 gerai di berbagai wilayah di Indonesia

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN DAN RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

## **A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pasal No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam peraturan POJK 36/POJK.04/2014 berikut:

- 1) Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 2) Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan Perseroan dengan tanggal 16 Oktober 2017.
- 4) Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

## **B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI**

### **NAMA OBLIGASI**

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 ("Obligasi").

### **JANGKA WAKTU, JUMLAH NOMINAL DAN JATUH TEMPO**

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 19 November 2018 untuk seri A, 9 November 2019 untuk seri B dan 9 November 2020 untuk seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.

### **JENIS OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO, setiap 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

### **JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **HARGA PENAWARAN**

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

### **PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) untuk seri A, 7,25% (tujuh koma dua lima persen) untuk seri B dan 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) untuk seri C. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018 sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 19 November 2018 untuk seri A, 9 November 2019 untuk Seri B dan 9 November 2020 untuk seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang terutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini adalah sebagai berikut :

Bunga Ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	9 Februari 2018	9 Februari 2018	9 Februari 2018
2	9 Mei 2018	9 Mei 2018	9 Mei 2018
3	9 Agustus 2018	9 Agustus 2018	9 Agustus 2018
4	19 November 2018	9 November 2018	9 November 2018
5		9 Februari 2019	9 Februari 2019
6		9 Mei 2019	9 Mei 2019
7		9 Agustus 2019	9 Agustus 2019
8		9 November 2019	9 November 2019
9			9 Februari 2020
10			9 Mei 2020
11			9 Agustus 2020
12			9 November 2020

#### JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan konsumen dan/atau sewa pembiayaan dan/atau piutang lainnya yang belum jatuh tempo atau, yang pembayaran angsurannya tidak menunggak dalam waktu lebih dari 90 Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:

- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi berikut perubahan-perubahannya menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

#### PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

#### PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 No. 20 tanggal 19 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
 Menara BTN lantai 18  
 Jl. Gajah Mada No. 1  
 Jakarta 10130, Indonesia  
 Tel: (+62-21) 6336 789 ext. 1844-1847  
 Up. Institutional Banking Division  
 Email : [trustee.btn@gmail.com](mailto:trustee.btn@gmail.com)  
 Website : [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

### HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

### KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
  - a) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir 1 huruf.a diatas); atau
  - c) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - d) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang nilainya melebihi 25% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan default yaitu dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a) Butir 1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau;
  - b) Butir 1 huruf d diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat untuk menghilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
  - c) Butir 1 huruf b dan c diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Apabila:
  - a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau
  - c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan

untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XI Tata cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

## HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemerinkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Rating Indonesia. Berdasarkan hasil pemerinkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 224/DIR/RAT/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hasil pemerinkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah:

**AA<sup>(id)</sup>**  
**(Double A minus)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemerinkatan.

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11.

## HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah konkuren atas Jaminan.

## HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- b. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- d. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)**

1. 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
2. Pembelian kembali (*buy back*) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO.
3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) jika pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK mengenai rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut.
5. Pengumuman tersebut harus mencantumkan:
  - a) periode penawaran pembelian kembali (*buy back*);
  - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*);
  - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi (*buy back*);
  - e) tata cara penyelesaian transaksi;
  - f) persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
  - h) tata cara pembelian kembali (*buy back*) Obligasi; dan
  - i) hubungan Afiliasi antara Emiten dan pemegang Obligasi;
6. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
  - i. konfirmasi tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;
  - ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
  - iii. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
7. Perseroan akan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah maksimal dana untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan tidak termasuk Pemegang Obligasi yang merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
8. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (*buy back*) pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam ayat 10.5 huruf b) Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
  - ii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
  - iii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

11. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. informasi yang meliputi antara lain:
  - i. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - ii. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - iii. Harga pembelian kembali (*buy back*) yang telah terjadi; dan
  - iv. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
12. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Perseroan juga wajib menyampaikan kepada OJK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilaksanakan.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
14. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada OJK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan tersebut. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
15. Dalam hal dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
16. Pembelian kembali (*buy back*) oleh Perseroan mengakibatkan:
  - Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan;
  - Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
17. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
18. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) tersebut;
19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali (*buy back*) wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
  - b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
  - d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dengan tetap memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
  - e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan peraturan KSEI;
  - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya. atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
  - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
  - a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan

- permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR. Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
  3. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, OJK, dan Perseroan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK dan Bursa Efek, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
  4. Tata Cara RUPO:
    - a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatitkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
    - b. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
    - c. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
    - d. pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      - Agenda RUPO;
      - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
      - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
      - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
    - e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
    - f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
    - g. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
    - h. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
    - i. satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
    - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - k. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
    - l. selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
    - m. pada saat pelaksanaan RUPO:
      - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
    - n. kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta

- semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
- o. atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO kedua.
      - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
      - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO ketiga.
      - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - b. bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
      - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
      - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
      - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - c. bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
      - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

- apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliananatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
  7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh, dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
  8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 17.2. Perjanjian Perwaliananatan.
  9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

#### **PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan Perwaliananatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*), Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan pembayaran kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan atau kepada kreditor lainnya yang hutangnya tidak dijamin dengan jaminan khusus (Kreditor Preferen), selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan dan Pengakuan Hutang.
  - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - c. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau Bunga Obligasi.
  - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan
  - e. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 8 (delapan) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 8 (delapan) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
  
3. Perseroan berkewajiban untuk:
  - a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
  - b. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Keuangan No.: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-9-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 28/POJK.5/2014, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan (kecuali untuk rasio yang diatur dalam butir iii ayat 6.3 Pasal ini) atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Emiten dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - c. Memastikan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan pada poin 3.3.g dibawah ini, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 (sepuluh) kali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
  - f. Dalam hal terjadinya kelalaian, mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Emiten.
  - g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
    - i. Laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
    - ii. Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu :
      - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
      - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
      - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritads Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
      - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
    - iii. Laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir

tanggal laporan keuangan triwulan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek.

- h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;  
Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- i. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
  - i. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - ii. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
  - iv. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang nilai material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada).
  - v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
  - vi. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan.
- j. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan:
  - a) Pemeringkatan Tahunan
    - i. Emiten wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup (1) peringkat tahunan yang diperoleh dan (2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek Indonesia paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) peringkat baru; dan (2) penjelasan singkat mengenai factor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
  - c) Pemeringkatan Oblifikasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan
    - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: (1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan (2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014
  - d) Pemeringkatan Ulang
    - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkatan terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir j huruf a) butir i dan huruf b), maka Perseroan wajib

menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud

- ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud

Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas jasa Keuangan apabila ada perubahan terhadap peraturan Bapepam dan LK no. IX.C.11

- k. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- l. Mempertahankan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang dimulai pada selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sampai dengan dilunasinya seluruh Jumlah Terhutang.
- m. Jika terjadi kekurangan atas nilai jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, maka Perseroan wajib menambah Jaminan atau Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang. Dalam hal Jaminan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam huruf m, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.
- n. Perseroan berkewajiban mengganti seluruh atau sebagian tagihan Perseroan kepada nasabah yang menjadi obyek Jaminan yang telah melewati jangka waktu untuk selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya penagihan namun tidak dibayar oleh nasabah dengan tagihan Perseroan kepada nasabah lainnya yang nilainya setara dengan yang digantikan.
- o. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

#### **TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG**

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang yang penggunaannya untuk pendanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi:

#### **PERSEROAN**

**PT BFI Finance Indonesia Tbk**  
BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)  
UP: Finance & IT Director /  
Finance dan Treasury Department Head

#### **WALI AMANAT**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**  
Menara BTN lantai 18  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130  
Telepon: (021) 6336 789 ext. 1844 - 1847  
Up. Institutional Banking Division  
Email : [trustee.btn@gmail.com](mailto:trustee.btn@gmail.com)  
Website : [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

---

**HUKUM YANG BERLAKU**

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya (sudah termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,2682% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,1712% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,0306%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,110% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0306%).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,0206% (yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0165%; dan biaya jasa Notaris: 0,0041%).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0451% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0066% dan biaya jasa perusahaan pemeringkat efek: 0,0385%).
- Biaya pencatatan; 0,0238% (yang terdiri dari biaya Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): 0,0040% dan BEI sebesar 0,0198%).
- Biaya lain-lain (termasuk biaya-biaya percetakan, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal tersebut): 0,0075%.

Sesuai dengan Surat No. Corp/Sjn/L/VII/17-0111 tanggal 10 Juli 2017 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana Obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan tersebut tersedia secara publik dan diperoleh di "http://www.idx.co.id".

#### Laporan Posisi Keuangan

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
<b>Aset</b>			
Kas dan setara kas	282.038	165.388	777.233
Investasi neto sewa pembiayaan - bersih	8.272.361	7.121.175	5.209.847
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	5.263.117	4.462.184	4.688.156
Beban dibayar di muka	42.693	41.929	40.451
Piutang lain-lain - bersih	252.341	170.660	141.317
Aset tetap – bersih	427.178	414.143	427.875
Aset tak berwujud – bersih	20.731	19.712	22.287
Aset derivatif	-	41.301	440.832
Aset pajak tangguhan	43.644	36.554	13.885
Aset lain-lain	84.009	3.210	8.531
<b>Jumlah Aset</b>	<b>14.688.112</b>	<b>12.476.256</b>	<b>11.770.414</b>
<b>Liabilitas</b>			
Pinjaman yang diterima	6.132.765	4.690.939	5.636.699
Utang pajak	38.544	93.541	70.449
Beban yang masih harus dibayar	174.366	190.240	140.586
Imbalan pasca-kerja	181.343	140.392	111.967
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.390.137	2.965.295	1.681.116
Liabilitas derivatif	29.594	-	-
Utang dividen	1.343	1.251	1.003
Utang lain – lain	151.574	139.914	109.491
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>10.099.666</b>	<b>8.221.572</b>	<b>7.751.311</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp25 (2016, 2015: Rp 250) (nilai penuh per saham)			
Modal dasar - 20.000.000.000 saham (2016, 2015: 2.000.000.000 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -15.967.115.620 saham (2016 : 1.596.711.562 saham, 2015 : 1.565.959.562 saham)	399.178	399.178	391.490
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	553.286	475.176
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	(4.044)
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	-	-	6.117
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	(37.237)	(32.875)	24.563
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(72.514)	(49.390)	(43.784)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	72.733	31.696	22.374
Belum ditentukan penggunaannya	3.925.160	3.604.949	3.147.211
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.588.446</b>	<b>4.254.684</b>	<b>4.019.103</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>14.688.112</b>	<b>12.476.256</b>	<b>11.770.414</b>

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	30 Juni		31 Desember	
	2017	2016*)	2016	2015
Pendapatan	1.885.498	1.559.421	3.227.109	2.830.617
Beban	1.227.020	1.097.401	2.202.146	1.995.123
Laba sebelum pajak penghasilan	658.478	462.020	1.024.963	835.494
Beban pajak penghasilan	132.622	121.581	226.598	185.206
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>525.856</b>	<b>340.439</b>	<b>798.365</b>	<b>650.288</b>
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(27.486)	(96.622)	(63.044)	62.631
<b>Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>498.370</b>	<b>243.817</b>	<b>735.321</b>	<b>712.919</b>

\*) tidak diaudit

## Rasio-Rasio Keuangan dan Pertumbuhan

Description	30 Juni		31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan	34,9	29,6	31,8	29,5
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	27,9	21,8	24,7	23,0
Laba periode/tahun berjalan / rata-rata ekuitas**	23,8	16,3	19,3	17,1
Laba sebelum pajak penghasilan / rata-rata aset**	9,7	7,6	8,5	7,8
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Utang bersih terhadap ekuitas ( <i>Gearing Ratio</i> )***	2,0	1,7	1,8	1,6
Solvabilitas aset	0,6	0,6	0,6	0,6
Solvabilitas ekuitas	2,1	1,7	1,8	1,8
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Jumlah pendapatan	16,9	10,2	14,0	23,1
Laba periode/tahun berjalan	31,7	4,7	22,8	8,3
Jumlah aset	17,7	(0,7)	6,0	21,6
Jumlah liabilitas	22,8	(2,3)	6,1	26,7
Jumlah ekuitas	7,8	2,3	5,9	12,7
<b>RASIO KUALITAS ASET (%)</b>				
Penyisihan kerugian penurunan nilai terhadap piutang yang dikelola	1,8	1,8	1,4	1,5
Piutang pembiayaan bermasalah terhadap piutang yang dikelola	1,09	1,51	0,91	1,33

\*) tidak diaudit

\*\*\*) laba sebelum pajak penghasilan dan laba periode berjalan utk Juni 2016 dan 2017 disetahunkan

\*\*\*) (pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan - kas dan setara kas) / ekuitas

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan Perseroan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan perbandingan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### Analisa Laporan Keuangan

#### a. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017	2016*	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Pendapatan	1.885.498	1.559.421	326.077	20,9%	3.227.109	2.830.617	396.492	14,0%
Beban	1.227.020	1.097.401	129.619	11,8%	2.202.146	1.995.123	207.023	10,4%
Laba sebelum pajak penghasilan	658.478	462.020	196.458	42,5%	1.024.963	835.494	189.469	22,7%
Beban pajak penghasilan	132.622	121.581	11.041	9,1%	226.598	185.206	41.392	22,3%
<b>Laba periode berjalan</b>	<b>525.856</b>	<b>340.439</b>	<b>185.417</b>	<b>54,5%</b>	<b>798.365</b>	<b>650.288</b>	<b>148.077</b>	<b>22,8%</b>
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(27.486)	(96.622)	69.136	71,6%	(63.044)	62.631	(125.675)	200,7%
<b>Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan</b>	<b>498.370</b>	<b>243.817</b>	<b>254.553</b>	<b>104,4%</b>	<b>735.321</b>	<b>712.919</b>	<b>22.402</b>	<b>3,1%</b>

\*)tidak diaudit

#### Jumlah Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni			Pertumbuhan			31 Desember			Pertumbuhan		
	2017	%	2016*	Nilai	%	2016	%	2015	Nilai	%	2015	
Sewa pembiayaan	1.057.517	56,1%	768.910	288.607	37,5%	1.675.488	51,9%	1.075.770	599.718	38,0%	55,7%	
Pembiayaan konsumen	772.680	41,0%	734.558	38.122	5,2%	1.436.357	44,5%	1.591.092	(154.735)	56,2%	-9,7%	
Keuangan	2.043	0,1%	14.996	(12.953)	-86,4%	21.242	0,7%	35.527	(14.285)	1,3%	-40,2%	
Lain-lain	53.258	2,8%	40.957	12.301	30,0%	94.022	2,9%	128.228	(34.206)	4,5%	-26,7%	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.885.498</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.559.421</b>	<b>326.077</b>	<b>20,9%</b>	<b>3.227.109</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.830.617</b>	<b>396.492</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,0%</b>	

\*)tidak diaudit

#### Pendapatan Sewa Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017	2016*	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Pendapatan sewa pembiayaan	828.669	611.716	216.953	35,5%	1.332.174	884.977	447.197	50,5%
Pendapatan administrasi	128.580	90.863	37.717	41,5%	192.546	115.867	76.679	66,2%
Pendapatan denda keterlambatan	58.792	40.439	18.353	45,4%	91.806	48.151	43.655	90,7%
Pendapatan terminasi	41.476	25.892	15.584	60,2%	58.962	26.775	32.187	120,2%
<b>Jumlah Pendapatan Sewa Pembiayaan</b>	<b>1.057.517</b>	<b>768.910</b>	<b>288.607</b>	<b>37,5%</b>	<b>1.675.488</b>	<b>1.075.770</b>	<b>599.718</b>	<b>55,7%</b>

\*)tidak diaudit

## Pendapatan Pembiayaan Konsumen

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017	2016 <sup>*</sup>	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Pendapatan pembiayaan konsumen	622.686	660.953	(38.267)	-5,8%	1.275.759	1.593.900	(318.141)	-20,0%
Pendapatan administrasi	130.246	100.015	30.231	30,2%	199.762	168.342	31.420	18,7%
Pendapatan denda keterlambatan	57.505	66.274	(8.769)	-13,2%	129.284	143.538	(14.254)	-9,9%
Pendapatan terminasi	21.629	24.700	(3.071)	-12,4%	46.225	56.194	(9.969)	-17,7%
<b>Jumlah</b>	<b>832.066</b>	<b>851.942</b>	<b>(19.876)</b>	<b>-2,3%</b>	<b>1.651.030</b>	<b>1.961.974</b>	<b>(310.944)</b>	<b>-15,8%</b>
Dikurangi:								
Bagian pendapatan yang dibiayai bank sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama	(59.386)	(117.384)	57.998	49,4%	(214.673)	(370.882)	156.209	42,1%
<b>Jumlah Pendapatan Pembiayaan Konsumen</b>	<b>772.680</b>	<b>734.558</b>	<b>38.122</b>	<b>5,2%</b>	<b>1.436.357</b>	<b>1.591.092</b>	<b>(154.735)</b>	<b>-9,7%</b>

<sup>\*</sup> tidak diaudit

Berikut ini disampaikan rincian pendapatan sewa pembiayaan dan pendapatan pembiayaan konsumen yang berasal dari pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil), roda dua (sepeda motor), properti (Property Backed Financing), dan pendapatan sehubungan dengan transaksi kerja sama penerusan pinjaman sebagai berikut:

Uraian	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017	2016 <sup>*</sup>	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Kendaraan bermotor roda empat (mobil)	1.079.268	1.005.157	74.112	7,4%	2.033.911	1.975.861	58.051	2,9%
Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor)	200.887	143.270	57.617	40,2%	307.805	266.556	41.249	15,5%
Properti (KPR)	31.036	14.228	16.808	118,1%	33.840	16.838	17.002	101,0%
Alat berat dan mesin	140.163	110.013	30.150	27,4%	232.376	219.622	12.754	5,8%
<b>Sub-Total</b>	<b>1.451.355</b>	<b>1.272.669</b>	<b>178.686</b>	<b>14,0%</b>	<b>2.607.933</b>	<b>2.478.877</b>	<b>129.056</b>	<b>5,2%</b>
Pendapatan sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama	(57.855)	(112.566)	54.711	48,6%	(207.149)	(354.411)	147.262	41,6%
<b>Jumlah Pendapatan Pembiayaan</b>	<b>1.393.500</b>	<b>1.160.103</b>	<b>233.397</b>	<b>20,1%</b>	<b>2.400.784</b>	<b>2.124.466</b>	<b>276.318</b>	<b>13,0%</b>

<sup>\*</sup> tidak diaudit

## Piutang Pembiayaan - Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017	2016	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Sewa pembiayaan - bersih	8.272.361	6.222.915	2.049.446	32,9%	7.121.175	5.209.847	1.911.328	36,7%
Pembiayaan konsumen - bersih	5.263.117	4.380.412	882.705	20,2%	4.462.184	4.688.156	(225.972)	-4,8%
<b>Jumlah Piutang Pembiayaan - Bersih</b>	<b>13.535.478</b>	<b>10.603.327</b>	<b>2.932.151</b>	<b>27,7%</b>	<b>11.583.359</b>	<b>9.898.003</b>	<b>1.685.356</b>	<b>17,0%</b>

## Pembiayaan Baru

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2017		30 Juni 2016		Pertumbuhan		31 Desember 2016		31 Desember 2015		Pertumbuhan	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
Sewa pembiayaan	41.497	4.330.034	32.323	3.260.528	9.174	1.069.506	65.989	6.823.577	47.495	5.148.305	18.494	1.675.272
Pembiayaan konsumen	142.912	2.445.349	108.998	1.950.719	33.914	494.630	216.841	3.919.244	188.218	4.909.705	28.623	(990.461)
<b>Jumlah Pembiayaan Baru</b>	<b>184.409</b>	<b>6.775.383</b>	<b>141.321</b>	<b>5.211.247</b>	<b>43.088</b>	<b>1.564.136</b>	<b>282.830</b>	<b>10.742.821</b>	<b>235.713</b>	<b>10.058.010</b>	<b>47.117</b>	<b>684.811</b>
<b>Peningkatan</b>					<b>30,5%</b>	<b>30,0%</b>					<b>20,0%</b>	<b>6,8%</b>

## Umum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I tahun 2017 mencapai 5,01 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 4,9 persen. Sejak akhir tahun 2016, peningkatan kinerja ekspor dan impor yang cukup signifikan menjadi faktor positif pendorong ekonomi. Sementara itu, komponen terbesar pembentuk PDB yakni konsumsi dan investasi tumbuh relatif stabil. Dari sisi lapangan usaha, kecuali sektor pertambangan, seluruh sektor mampu mencatatkan pertumbuhan positif di semester I tahun 2017. Sektor pertanian dan jasa tercatat menjadi penyumbang utama pertumbuhan.

Ketidakpastian ekonomi global dan tren pelemahan volume perdagangan dunia sepanjang periode ini mempengaruhi ekonomi domestik, termasuk realisasi pertumbuhan ekonomi. Selain faktor tersebut, tren penurunan harga komoditas dunia, kebijakan debt ceiling oleh negara-negara Eropa dan AS, serta rebalancing ekonomi Tiongkok turut memengaruhi kinerja ekonomi global. Namun demikian, masih cukup baiknya permintaan domestik yaitu stabilnya konsumsi masyarakat, membaiknya investasi yang salah satunya ditandai dengan pemberian peringkat utang menjadi investment grade oleh lembaga pemeringkat S&P, perkiraan perbaikan perdagangan internasional, serta kinerja sektoral yang diperkirakan semakin meningkat memberikan optimisme terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2 persen pada akhir tahun 2017.

## **Pembiayaan Baru**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mencatat jumlah pembiayaan baru sebesar Rp6.775.383 juta, naik sebesar Rp1.564.136 juta atau 30,0% dari Rp5.211.247 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 (lihat tabel Pembiayaan Baru). Peningkatan yang terbesar terjadi pada Sewa Pembiayaan yaitu naik sebesar Rp1.069.506 juta atau 32,8% dibandingkan dengan periode enam bulan tahun sebelumnya, yang didukung oleh peningkatan pada pembiayaan mobil bekas yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat total pembiayaan baru sebesar Rp10.742.821 juta selama 2016, naik dari Rp10.058.010 juta atau setara dengan 6,8%. Peningkatan yang terbesar terjadi pada Sewa Pembiayaan yaitu naik sebesar Rp1.675.272 juta atau 32,6% dibanding tahun sebelumnya, yang didukung oleh peningkatan pada pembiayaan mobil bekas yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan. Sementara itu, Pembiayaan Konsumen mengalami kontraksi sebesar Rp990.461 juta atau 20,2%, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pembiayaan baru atas mobil baru. Penurunan ini sejalan dengan strategi Perseroan dalam mengurangi fokus pada pembiayaan baru di masa mendatang. Semua jenis aset lainnya dalam pembiayaan baru menunjukkan peningkatan yang sehat.

## **Jumlah Pendapatan**

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan pembiayaan yang terdiri dari pendapatan sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen yang disajikan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan utama Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Jumlah Pendapatan tumbuh sebesar 20,9% atau Rp326.077 juta menjadi Rp1.885.498 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari Rp1.559.421 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 (lihat tabel Jumlah Pendapatan). Pertumbuhan jumlah pendapatan ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah piutang bersih sebesar 27,7% (lihat tabel Piutang Pembiayaan – bersih) dan factor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut diantaranya ekspansi jaringan usaha yang telah dilakukan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah Pendapatan tumbuh sebesar 14,0% atau Rp396.492 juta menjadi Rp3.227.109 juta pada 2016 (lihat tabel Jumlah Pendapatan). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada jumlah piutang bersih sebesar 17,0% (lihat tabel Piutang Pembiayaan – bersih), sejalan dengan keberhasilan Perseroan dalam memperluas jaringan pemasaran dan diversifikasi pembiayaan ke daerah-daerah yang tidak terdampak atas penurunan harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir ini.

## **Pendapatan Sewa Pembiayaan**

Pendapatan sewa pembiayaan terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan melalui skema sewa pembiayaan, dengan objek pembiayaan yang antara lain meliputi kendaraan bermotor roda empat (mobil), alat-alat berat, seperti *excavator*, *bulldozer*, *dump truck*, kendaraan komersial dan sebagainya, pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan sewa pembiayaan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Jumlah pendapatan sewa pembiayaan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp1.057.517 juta atau 56,1% dari jumlah pendapatan Perseroan, mengalami kenaikan 37,5% atau Rp288.607 juta dibanding dengan Rp768.910 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 (lihat tabel Pendapatan Sewa Pembiayaan). Peningkatan ini terutama di kontribusi dari pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp216.953 juta atau 35,5% menjadi Rp828.669 juta. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan adalah pertumbuhan segmen kendaraan bermotor roda empat yang dibukukan sebagai piutang sewa pembiayaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Sepanjang tahun 2016, jumlah pendapatan sewa pembiayaan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi tumbuh sebesar Rp599.718 juta atau 55,7% menjadi Rp1.675.488 juta dibanding dengan tahun 2015 sebesar Rp1.075.770 juta. Peningkatan ini utamanya berasal dari peningkatan pendapatan sewa pembiayaan (lihat tabel Pendapatan Sewa Pembiayaan) sebesar Rp447.197 juta atau 50,5% yang berasal dari pembiayaan kendaraan untuk tujuan modal kerja dan investasi yang dibukukan sebagai piutang sewa pembiayaan.

### **Pendapatan Pembiayaan Konsumen**

Pendapatan pembiayaan konsumen terdiri dari pendapatan yang diperoleh sebagian besar dari kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan roda dua (sepeda motor) dan property yang dibiayai Perseroan sendiri serta pendapatan yang menjadi porsi Perseroan sehubungan dengan transaksi kerja sama pembiayaan bersama, penerusan pinjaman dan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Jumlah pendapatan pembiayaan konsumen termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi adalah Rp772.680 juta yang memberikan kontribusi sebesar 41,0% dari jumlah pendapatan Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 5,2% (lihat tabel Pendapatan Pembiayaan Konsumen), sedangkan dari pendapatan pembiayaan konsumen sendiri mengalami penurunan sebesar Rp38.267 juta atau 5,8%, hal ini sejalan dengan penurunan sisi piutang pembiayaan mobil baru yang merupakan keputusan manajemen untuk mengalihkan fokus dari segmen mobil baru ke segmen mobil bekas yang secara kualitas aset lebih bagus tingkat kolektibilitasnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah pendapatan pembiayaan konsumen termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi sepanjang tahun 2016 adalah Rp1.436.357 juta yang memberikan kontribusi sebesar 44,5% dari jumlah pendapatan Perseroan (lihat tabel Pendapatan Pembiayaan Konsumen) mengalami penurunan sebesar 9,7% atau Rp154.735 juta dibanding dengan 2015 sebesar Rp1.591.092 juta.

Jika dilihat dari sisi pendapatan pembiayaan konsumen diluar pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi selama 2016 mengalami penurunan sebesar 20,0% atau Rp318.141 juta dibanding dengan 2015, penurunan ini sejalan dengan penurunan sisi piutang pembiayaan mobil baru yang disebabkan oleh keputusan strategis manajemen untuk sangat selektif atas sektor ini.

### **Pendapatan Keuangan**

Pendapatan keuangan utamanya berasal dari pendapatan jasa giro bank atau bunga atas penempatan deposito berjangka atas kelebihan arus kas Perseroan yang belum dapat disalurkan dalam pembiayaan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Pendapatan keuangan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp2.043 juta atau 0,1% dari jumlah pendapatan, terjadi penurunan 86,4% atau Rp12.953 juta dari Rp14.996 juta yang merupakan 1,0% dari jumlah

pendapatan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan tersebut disebabkan Perseroan semakin efisien dalam mengelola dana sehingga semakin sedikit *idle fund* yang terjadi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan keuangan mengalami kontraksi sebesar Rp14.285 juta atau 40,2% dari jumlah tahun 2015. Hal ini timbul karena tidak ada kelebihan dana mengendap yang signifikan selama 2016 dibanding dengan 2015, yang berarti pengelolaan dana yang lebih efektif selama 2016.

### Pendapatan Lain-lain

Pendapatan yang diklasifikasikan sebagai pendapatan lain-lain adalah pendapatan diluar pendapatan pembiayaan dan bunga yang terdiri dari pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan, keuntungan bersih atas penjualan aset tetap, dan lainnya.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Pendapatan lain-lain pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp53.258 juta atau 2,8% dari jumlah pendapatan, tumbuh 30,0% atau Rp12.301 juta dibandingkan dengan Rp40.957 juta yang merupakan 2,6% dari jumlah pendapatan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan dari pendapatan lain-lain ini terutama di kontribusi dari keuntungan bersih atas penjualan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan lain-lain pada tahun 2016 mencapai Rp94.022 juta, turun 26,7% dari jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp128.228 juta. Penurunan dari pendapatan lain-lain ini di kontribusi dari penurunan pendapatan rupa-rupa.

### Jumlah Beban

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>											
	30 Juni				Pertumbuhan		31 Desember				Pertumbuhan	
	2017	%	2016*	%	Nilai	%	2016	%	2015	%	Nilai	%
Bunga dan keuangan	424.029	34,6%	399.261	36,4%	24.768	6,2%	792.281	36,0%	712.123	35,7%	80.158	11,3%
Gaji dan tunjangan	421.900	34,4%	345.580	31,5%	76.320	22,1%	715.765	32,5%	626.324	31,4%	89.441	14,3%
Umum dan administrasi	196.772	16,0%	189.391	17,3%	7.381	3,9%	392.315	17,8%	341.267	17,1%	51.048	15,0%
Penyisihan kerugian penurunan nilai:												
Piutang pembiayaan konsumen	99.099	8,1%	83.898	7,6%	15.201	18,1%	190.134	8,6%	141.594	7,1%	48.540	34,3%
Piutang sewa pembiayaan	85.220	6,9%	56.936	5,2%	28.284	49,7%	83.191	3,8%	88.560	4,4%	(5.369)	-6,1%
Lain-lain	-	0,0%	22.335	2,0%	(22.335)	-100,0%	28.460	1,3%	85.255	4,3%	(56.795)	-66,6%
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.227.020</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.097.401</b>	<b>100,0%</b>	<b>129.619</b>	<b>11,8%</b>	<b>2.202.146</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.995.123</b>	<b>100,0%</b>	<b>207.023</b>	<b>10,4%</b>

\*tidak diaudit

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah beban mencapai Rp1.227.020 juta dimana beban tersebut utamanya berasal dari beban bunga dan keuangan sebesar Rp424.029 juta atau yang merupakan 34,6% dari jumlah beban, dan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp421.900 juta atau mewakili 34,4% dari jumlah beban.

Terjadi peningkatan jumlah beban sebesar Rp129.619 juta atau 11,8%. Kenaikan ini terutama di kontribusi oleh kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar Rp24.768 juta atau 6,2%, kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp76.320 juta atau 22,1% serta kenaikan beban penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp43.485 juta atau 30,9%.

### Beban Bunga dan Keuangan

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>							
	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017	2016*	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Pinjaman yang diterima	6.132.765	4.973.073	1.159.692	23,3%	4.690.939	5.636.699	(945.760)	-16,8%
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.390.137	2.123.504	1.266.633	59,6%	2.965.295	1.681.116	1.284.179	76,4%
<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>9.522.902</b>	<b>7.096.576</b>	<b>2.426.326</b>	<b>34,2%</b>	<b>7.656.234</b>	<b>7.317.815</b>	<b>338.419</b>	<b>4,6%</b>
Beban bunga dan keuangan	424.029	399.261	24.768	6,2%	792.281	712.123	80.158	11,3%
<b>Rata-rata Cost of Fund</b>	<b>10,33%</b>	<b>11,41%</b>		<b>-1,08%</b>	<b>11,25%</b>	<b>11,48%</b>		<b>-0,23%</b>

\*tidak diaudit

Beban bunga dan keuangan Perseroan merupakan beban yang timbul atas kegiatan pendanaan Perseroan, baik dari pinjaman maupun surat berharga yang diterbitkan.

Beban bunga dan keuangan Perseroan terdiri dari beban bunga atas pinjaman yang diterima, bunga atas surat berharga yang diterbitkan dan beban administrasi bank. Pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan tersebut diperlukan dalam rangka membiayai aktivitas pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Saat ini Perseroan menerima sumber pendanaan dari bank dalam negeri, bank luar negeri serta penerbitan surat berharga Obligasi PUB Rupiah maupun *Medium Term Notes*.

Selain memiliki sumber permodalan yang sangat kuat, Perseroan selalu mencari sumber pendanaan yang terdiversifikasi, sehingga tidak hanya tergantung pada satu atau dua bank tertentu saja. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan berhasil mendapatkan sumber pendanaan baru dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 senilai Rp1.000 miliar. Selain itu, Perseroan juga secara rutin mendapatkan pendanaan dari bank-bank dalam negeri maupun bank-bank di luar negeri melalui sindikasi utang.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Beban bunga dan keuangan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp424.029 juta yang merupakan 34,6% dari jumlah beban Perseroan, mengalami peningkatan sebesar 6,2% atau Rp24.768 juta dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp399.261 juta (lihat tabel Jumlah Beban). Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan sebesar Rp2.426.326 juta atau 34,2% pada jumlah pinjaman per 30 Juni 2017. Sementara itu, *cost of fund* rata-rata turun sebesar 108 basis poin, dari 11,41% menjadi 10,33%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban bunga dan keuangan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp792.281 juta yang merupakan 36,0% dari jumlah beban Perseroan, mengalami peningkatan sebesar 11,3% atau Rp80.158 juta dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan pada tahun 2015 sebesar Rp712.123 juta (lihat tabel Jumlah Beban). Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan sebesar Rp338.419 juta atau 4,6% pada jumlah pinjaman per 31 Desember 2016. Sementara itu, *cost of fund* rata-rata turun sebesar 23 basis poin, dari 11,48% menjadi 11,25%.

### Beban Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari seluruh gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan sepanjang tahun/periode berjalan, termasuk tunjangan-tunjangan yang terkait dengan posisi/jabatan atau penempatan karyawan, biaya tunjangan kesehatan, pajak karyawan, dan imbalan pasca kerja yang dicadangkan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Rincian beban gaji dan tunjangan Perseroan adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017	2016*	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Gaji dan imbalan kerja	403.898	316.277	87.621	27,7%	667.806	588.966	78.840	13,4%
Imbalan pasca kerja	18.002	17.430	572	3,3%	36.086	29.617	6.469	21,8%
Cadangan opsi saham	-	11.873	(11.873)	-100,0%	11.873	7.741	4.132	53,4%
<b>Jumlah Gaji dan Tunjangan</b>	<b>421.900</b>	<b>345.580</b>	<b>76.320</b>	<b>22,1%</b>	<b>715.765</b>	<b>626.324</b>	<b>89.441</b>	<b>14,3%</b>

\*) tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Beban gaji dan tunjangan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp421.900 juta yang merupakan 34,4% dari jumlah beban Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, mengalami peningkatan 22,1% atau Rp76.320 juta dari Rp345.580 juta yang merupakan 31,5% dari jumlah beban Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan sebesar 16,0% yaitu dari 8.231 orang di 30 Juni 2016 menjadi 9.545 orang di 30 Juni 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban gaji dan tunjangan pada tahun 2016 mencapai Rp715.765 juta atau 32,5% dari jumlah beban Perseroan pada tahun 2016, meningkat sebesar 14,3% dari jumlah beban gaji dan tunjangan di tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan sebesar 12,8% yaitu dari 7.924 orang di 31 Desember 2015 menjadi 8.941 orang di 31 Desember 2016. Selain itu, besaran gaji mengalami penyesuaian sehubungan dengan kenaikan upah minimum secara nasional, berkisar antara 6,5%-17,2%, tergantung masing-masing provinsi.

## Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan Operasional dan pertumbuhan bisnis Perseroan yang terdiri dari beban penyusutan, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban jasa penerimaan angsuran, beban perjalanan dinas dan transportasi, beban asuransi, beban pendidikan dan pelatihan, dan beban lain-lain.

Peningkatan beban umum dan administrasi adalah seiring dengan peningkatan kapasitas yang diperlukan guna mendukung aktivitas bisnis Perseroan dan perluasan jaringan usaha yang ada.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Beban umum dan administrasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp196.772 juta yang merupakan 16,0% dari jumlah beban Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, mengalami peningkatan sebesar 3,9% atau Rp7.381 juta dibandingkan dengan beban umum dan administrasi periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp189.391 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban perjalanan dinas dan transportasi sebesar 37,5% atau Rp4.431 juta dan beban pemasaran sebesar 93,5% atau Rp1.799 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban umum dan administrasi pada tahun 2016 mencapai Rp392.315 juta yang merupakan 17,8% dari jumlah beban Perseroan pada tahun 2016, dan mengalami kenaikan sebesar 15,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar 283,3% atau Rp17.139 juta pada beban honorarium tenaga ahli, yang merupakan honorarium yang harus dibayar kepada konsultan selama tahun berjalan.

## Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai merupakan pencadangan kerugian yang dibentuk berdasarkan evaluasi terhadap penurunan nilai piutang pembiayaan (baik sewa pembiayaan maupun pembiayaan konsumen), yang dilakukan secara kolektif dan secara individual yang dievaluasi secara berkala (bulanan) guna memastikan kecukupan nilai cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang tercantum di laporan posisi keuangan mencerminkan nilai yang wajar.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mencapai Rp184.319 juta mengalami kenaikan sebesar 30,9% atau Rp43.485 juta dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp140.834 juta. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan piutang pembiayaan bersih Perseroan yang sebesar 27,7% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, meskipun disisi lain kualitas piutang menunjukkan perbaikan, dengan nilai piutang pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) menurun dari 1,51% pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi 1,09% pada tanggal 30 Juni 2017 dari seluruh piutang pembiayaan dalam kelolaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun 2016 mencapai Rp273.325 juta mengalami kenaikan sebesar 18,7% atau Rp43.171 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp230.154 juta. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan piutang pembiayaan bersih Perseroan yang sebesar 17,0% sepanjang tahun 2016, meskipun disisi lain kualitas piutang menunjukkan perbaikan pada tahun 2016, dengan nilai piutang pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) menurun dari 1,33% pada tahun 2015 menjadi 0,91% pada tahun 2016 dari seluruh piutang pembiayaan dalam kelolaan.

## Laba periode berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Selama periode enam bulan tahun 2017, pencapaian laba periode berjalan Perseroan adalah sebesar Rp525.856 juta, mengalami peningkatan sebesar 54,5% atau Rp185.417 juta dari Rp340.439 juta pada periode enam bulan tahun 2016. Hal ini menunjukkan konsistensi Perseroan dalam menjaga tingkat pertumbuhan yang positif ditengah kondisi perekonomian yang belum kondusif akibat perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi dunia serta penurunan harga komoditas yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sementara itu penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan adalah sebesar Rp498.370 juta, mengalami peningkatan sebesar 104,4% atau Rp254.553 juta dibandingkan dengan penghasilan komprehensif periode enam bulan tahun 2016. Hal ini terjadi karena penyesuaian estimasi aktuarial dan perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif Perseroan. Perubahan nilai wajar ini merupakan bentuk penyesuaian sementara dan akan kembali normal pada saat kontrak lindung nilai mencapai tenggat jatuh tempo. Perlu dicatat bahwa perubahan penghasilan komprehensif tidak berdampak terhadap kemampuan Perseroan memperoleh penghasilan dan laba, melainkan semata-mata karena perlakuan akuntansi semata.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Sepanjang tahun 2016, terjadi kerugian komprehensif lain sebesar Rp63.044 juta, dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain yang terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp62.631 juta. Hal ini menyebabkan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan menurun sebesar Rp125.675 juta dari Rp712.919 juta pada tahun 2015 menjadi Rp735.321 juta pada tahun 2016, atau kenaikan Rp22.402 juta.

## b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

### Aset

Sebagian besar aset Perseroan adalah berupa piutang pembiayaan yang terdiri dari investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen. Hal ini sejalan dengan fokus bisnis Perseroan dibidang pembiayaan, dimana sesuai ketentuan POJK No.29/POJK.05/2014, jumlah aset produktif suatu perusahaan pembiayaan adalah minimal 40% dari jumlah aset yang dimiliki.

Berikut adalah rincian aset Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 Juni	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2017	2016	Nilai	%	2015	Nilai	%
Kas dan setara kas	282.038	165.388	116.650	70,5%	777.233	(611.845)	-78,7%
Investasi neto sewa pembiayaan - bersih	8.272.361	7.121.175	1.151.186	16,2%	5.209.847	1.911.328	36,7%
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	5.263.117	4.462.184	800.933	17,9%	4.688.156	(225.972)	-4,8%
Beban dibayar di muka	42.693	41.929	764	1,8%	40.451	1.478	3,7%
Piutang lain-lain - bersih	252.341	170.660	81.681	47,9%	141.317	29.343	20,8%
Aset tetap - bersih	427.178	414.143	13.035	3,1%	427.875	(13.732)	-3,2%
Aset tak berwujud - bersih	20.731	19.712	1.019	5,2%	22.287	(2.575)	-11,6%
Aset derivatif	-	41.301	(41.301)	-100,0%	440.832	(399.531)	-90,6%
Aset pajak tangguhan	43.644	36.554	7.090	19,4%	13.885	22.669	163,3%
Aset lain-lain	84.009	3.210	80.799	2517,1%	8.531	(5.321)	-62,4%
<b>Jumlah Aset</b>	<b>14.688.112</b>	<b>12.476.256</b>	<b>2.211.856</b>	<b>17,7%</b>	<b>11.770.414</b>	<b>705.842</b>	<b>6,0%</b>

### 30 Juni 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp14.688.112 juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.211.856 juta atau 17,7% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp12.476.256 juta. Kenaikan jumlah aset Perseroan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset terkait kegiatan utama Perseroan yaitu piutang pembiayaan.

Jumlah investasi neto sewa pembiayaan - bersih pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp8.272.361 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.151.186 juta atau 16,2% dibandingkan dengan jumlah investasi neto sewa pembiayaan - bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7.121.175 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan pembiayaan sewa pembiayaan, khususnya pembiayaan atas alat-alat berat, mesin dan peralatan lainnya, serta mobil bekas yang dibukukan sebagai bagian dari investasi neto sewa pembiayaan - bersih.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp5.263.117 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp800.933 juta atau 17,9% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.462.184 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan atas mobil bekas dan motor.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan aset lainnya:

- **Kas dan setara kas**

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp282.038 juta mengalami kenaikan sebesar Rp116.650 juta atau sebesar 70,5% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp165.388 juta. Kenaikan kas dan setara kas ini disebabkan karena adanya pencairan pinjaman bank yang belum dapat disalurkan seketika ke aktivitas pembiayaan baru. Peningkatan ini sifatnya hanya sementara.

- **Piutang Pembiayaan konsumen - bersih**

Jumlah piutang pembiayaan konsumen – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.462.184 juta, mengalami penurunan sebesar Rp225.972 juta atau 4,8% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.688.156 juta. Penurunan ini sejalan dengan adanya perubahan kebijakan fokus pembiayaan konsumen dengan mengurangi fokus di di bidang pembiayaan mobil baru, yang mengakibatkan penurunan kontribusi pembiayaan yang berasal dari mobil baru terhadap keseluruhan nilai pembiayaan. Sebelumnya salah satu sumber pembiayaan yang diandalkan di tahun 2015 adalah pada segmen mobil baru, sementara di tahun 2016 segmen ini mengalami penurunan sebesar 77,3% yang terjadi karena keputusan manajemen untuk mengalihkan fokus dari segmen mobil baru ke segmen mobil bekas yang secara kualitas aktiva lebih bagus tingkat kolektibilitasnya.

- **Beban dibayar dimuka**

Jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp42.693 juta mengalami kenaikan sebesar Rp764 juta atau 1,8% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh pembayaran biaya-biaya yang memiliki masa manfaat diatas tanggal laporan keuangan 30 Juni 2017. Tidak ada perubahan kebijakan terkait hal ini, dan kenaikan yang terjadi semata-mata adalah karena jatuh tempo pembayaran atas biaya yang memiliki masa manfaat di atas tanggal neraca.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp252.341 juta mengalami kenaikan sebesar Rp81.681 juta atau sebesar 47,9% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp170.660 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya perbedaan temporer dalam pencatatan penerimaan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui *Payment Point Online Bank* dimana dana pembayaran tersebut telah masuk di rekening *Payment Point* namun baru dikreditkan ke rekening Perseroan pada hari kerja berikutnya.

- **Aset tetap - bersih**

Jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp427.178 juta mengalami kenaikan sebesar Rp13.035 juta atau sebesar 3,1% dibandingkan dengan jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp414.143 juta. Kenaikan aset tetap ini terutama berasal dari pembelian kendaraan untuk operasional Perseroan.

- **Aset tak berwujud - bersih**

Jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp20.731 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.019 juta atau sebesar 5,2% dibandingkan dengan jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp19.712 juta. Kenaikan aset tak berwujud ini terutama berasal dari pembelian piranti lunak Perseroan.

- **Aset derivatif**

Posisi aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.301 juta mengalami perubahan menjadi liabilitas derivatif sebesar Rp29.594 juta. Hal ini sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*).

- **Aset pajak tangguhan**

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp43.644 juta mengalami kenaikan sebesar Rp7.090 juta atau 19,4% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp36.554 juta. Peningkatan aset pajak tangguhan ini terutama disebabkan oleh beda temporer antara pengakuan secara akuntansi dengan pengakuan secara fiskal, khususnya berkaitan dengan pencadangan imbalan pasca-kerja. Tidak terdapat dampak apapun atas perubahan aset pajak tangguhan dengan kewajiban perpajakan Perseroan secara fiskal.

- **Aset lain-lain**

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp84.009 juta mengalami kenaikan sebesar Rp80.799 juta dibandingkan dengan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.210 juta. Peningkatan aset lain-lain terutama disebabkan adanya uang muka atas pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor operasional Perseroan.

#### 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.476.256 juta mengalami kenaikan sebesar Rp705.842 juta atau 6,0% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp11.770.414 juta. Kenaikan jumlah aset Perseroan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pos investasi neto sewa pembiayaan – bersih.

Jumlah investasi neto sewa pembiayaan – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.121.175 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.911.328 juta atau 36,7% dibandingkan dengan jumlah investasi neto sewa pembiayaan – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.209.847 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan pembiayaan sewa pembiayaan, khususnya pembiayaan atas alat-alat berat, mesin dan peralatan lainnya, serta mobil bekas yang dibukukan sebagai bagian dari investasi neto sewa pembiayaan – bersih.

Selain perubahan di atas yang signifikan atas aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan aset lainnya:

- **Kas dan setara kas**

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp165.388 juta mengalami penurunan sebesar Rp611.845 juta atau sebesar 78,7% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp777.233 juta. Saldo kas dan setara kas yang tinggi pada akhir tahun 2015 terjadi karena pencairan dana bank yang sudah dijadwalkan tidak dapat disalurkan sesuai target awal, sehingga terjadi likuiditas per akhir tahun 2015.

- **Piutang Pembiayaan konsumen - bersih**

Jumlah piutang pembiayaan konsumen – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.462.184 juta, mengalami penurunan sebesar Rp225.972 juta atau 4,8% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.688.156 juta. Penurunan ini sejalan dengan adanya perubahan kebijakan fokus pembiayaan konsumen dengan mengurangi fokus di di bidang pembiayaan mobil baru, yang mengakibatkan penurunan kontribusi pembiayaan yang berasal dari mobil baru terhadap keseluruhan nilai pembiayaan. Sebelumnya salah satu sumber pembiayaan yang diandalkan di tahun 2015 adalah pada segmen mobil baru, sementara di tahun 2016 segmen ini mengalami penurunan sebesar 77,3% yang terjadi karena keputusan manajemen untuk mengalihkan fokus dari segmen mobil baru ke segmen mobil bekas yang secara kualitas aktiva lebih bagus tingkat kolektibilitasnya.

- **Beban dibayar dimuka**

Jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.929 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.478 juta atau 3,7% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh pembayaran biaya-biaya yang memiliki masa manfaat diatas tanggal laporan keuangan 31 Desember 2016. Tidak ada perubahan kebijakan terkait hal ini, dan kenaikan yang terjadi semata-mata adalah karena jatuh tempo pembayaran atas biaya yang memiliki masa manfaat di atas tanggal neraca.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp170.660 juta mengalami kenaikan sebesar Rp29.343 juta atau sebesar 20,8% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp141.317 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan piutang yang timbul akibat pembelian saham MESOP oleh karyawan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Selain itu terdapat kenaikan atas perbedaan temporer dalam pencatatan penerimaan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui *Payment Point Online Bank* dimana dana pembayaran tersebut telah masuk di rekening *Payment Point* namun baru dikreditkan ke rekening Perseroan pada hari kerja berikutnya.

- **Aset tetap - bersih**

Jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp414.143 juta mengalami penurunan sebesar Rp13.732 juta atau sebesar 3,2% dibandingkan dengan jumlah aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp427.875 juta. Penurunan aset tetap ini terutama terjadi karena peningkatan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap yang lebih besar dibandingkan nilai pembelian aset baru Perseroan. Tidak ada perubahan kebijakan Perseroan terkait dengan aset tetap tersebut.

- **Aset tak berwujud - bersih**

Jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp19.712 juta mengalami penurunan sebesar Rp2.575 juta atau sebesar 11,6% dibandingkan dengan jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp22.287 juta. Penurunan aset tak berwujud ini terutama terjadi karena peningkatan jumlah akumulasi penyusutan aset tak berwujud yang lebih besar dibandingkan nilai pembelian aset tak berwujud baru Perseroan.

- **Aset derivatif**

Jumlah aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.301 juta mengalami penurunan sebesar Rp399.531 juta atau 90,6% dibandingkan dengan jumlah aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp440.832 juta. Penurunan ini terjadi sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*). Penurunan tersebut sejalan dengan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing per 31 Desember 2016 dibanding tahun sebelumnya, serta penurunan jumlah pinjaman dalam mata uang asing, dari USD360.596.865 di akhir tahun 2015 menjadi USD182.260.270 di akhir tahun 2016.

- **Aset pajak tangguhan**

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp36.554 juta mengalami kenaikan sebesar Rp22.669 juta atau 163,3% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.885 juta. Peningkatan aset pajak tangguhan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif lain atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai arus kas. Tidak terdapat dampak apapun atas perubahan ini terhadap utang pajak Perseroan secara fiskal.

- **Aset lain-lain**

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.210 juta mengalami penurunan sebesar Rp5.321 juta atau 62,4% dibandingkan dengan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp8.531 juta. Penurunan aset lain-lain terutama disebabkan menurunnya akrual pendapatan bunga deposito karena telah jatuh tempo.

## Liabilitas

Sebagai perusahaan pembiayaan, aset terbesar Perseroan adalah berupa piutang Pembiayaan, dan sejalan dengan itu, Perseroan membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari dana pihak ketiga yaitu berupa pinjaman dari bank dalam dan luar negeri serta instrumen surat berharga. Selain itu, liabilitas lainnya merupakan utang atau kewajiban yang timbul atas transaksi bisnis yang bersifat wajar dan telah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

Berikut adalah perincian liabilitas Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 Juni	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2017	2016	Nilai	%	2015	Nilai	%
Pinjaman yang diterima	6.132.765	4.690.939	1.441.826	30,7%	5.636.699	(945.760)	-16,8%
Utang pajak	38.544	93.541	(54.997)	-58,8%	70.449	23.092	32,8%
Beban yang masih harus dibayar	174.366	190.240	(15.874)	-8,3%	140.586	49.654	35,3%
Imbalan pasca-kerja	181.343	140.392	40.951	29,2%	111.967	28.425	25,4%
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.390.137	2.965.295	424.842	14,3%	1.681.116	1.284.179	76,4%
Liabilitas derivatif	29.594	-	29.594	n/a	-	-	n/a
Utang dividen	1.343	1.251	92	7,4%	1.003	248	24,7%
Utang lain – lain	151.574	139.914	11.660	8,3%	109.491	30.423	27,8%
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>10.099.666</b>	<b>8.221.572</b>	<b>1.878.094</b>	<b>22,8%</b>	<b>7.751.311</b>	<b>470.261</b>	<b>6,1%</b>

### 30 Juni 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp10.099.666 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.878.094 juta atau 22,8% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp8.221.572 juta. Kenaikan terutama terjadi pada pos pinjaman yang diterima, dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.441.826 juta atau 30,7% pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi sebesar Rp6.132.765 juta dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.690.939 juta. Peningkatan pinjaman yang diterima terutama dalam pinjaman berjangka (*term loan*) dari sumber pendanaan dalam negeri, khususnya didorong oleh penurunan suku bunga pinjaman dalam negeri.

Jumlah surat berharga yang diterbitkan – bersih pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp3.390.137 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp424.842 juta atau 14,3% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp2.965.295 juta. Hal ini terjadi karena selama periode enam bulan tahun 2017, Perseroan berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah nominal sebesar Rp1.000 miliar dan pada periode yang sama terjadi pelunasan obligasi jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp525.000 juta.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan liabilitas lainnya:

- **Utang pajak**

Jumlah utang pajak pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp38.544 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp54.997 juta atau 58,8% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp93.541 juta. Penurunan ini terutama karena adanya pembayaran pajak dividen tahun 2016 dan telah disetorkannya PPh pasal 21 tahunan yang terutang untuk tahun pajak 2016.

- **Beban yang masih harus dibayar**

Jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp174.366 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp15.874 juta atau 8,3% dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp190.240 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena sudah dibayarkannya bonus dan tunjangan karyawan selama periode enam bulan pada tahun 2017.

- **Imbalan pasca-kerja**

Jumlah imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp181.343 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp40.951 juta atau 29,2% dibandingkan dengan jumlah imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp140.392 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan asumsi yaitu penurunan tingkat diskonto dari 8,7% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 8,2% pada tanggal 30 Juni 2017.

- **Liabilitas derivatif**

Posisi aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.301 juta mengalami perubahan menjadi liabilitas derivatif sebesar Rp29.594 juta. Hal ini sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*).

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.343 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp92 juta atau 7,4% dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.251 juta. Utang dividen disebabkan oleh distribusi dividen interim berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi dan dividen tunai final berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- **Utang lain-lain**

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp151.574 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.660 juta atau 8,3% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp139.914 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya titipan konsumen dan utang terhadap rekanan asuransi yang masih dalam proses.

#### 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.221.572 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp470.261 juta atau 6,1% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp7.751.311 juta. Kenaikan terutama terjadi pada pos surat berharga yang diterbitkan – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.965.295 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.284.179 juta atau 76,4% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp1.681.116 juta. Peningkatan ini didorong oleh penerbitan dua Obligasi Berkelanjutan, masing-masing senilai Rp1 triliun selama tahun 2016, serta pelunasan kembali obligasi jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp555 miliar.

Selain perubahan di atas yang signifikan atas liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan liabilitas lainnya:

- **Pinjaman yang diterima**

Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.690.939 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp945.760 juta atau 16,8% dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.636.699 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan proporsi pinjaman dalam mata uang asing yang cukup besar selama tahun 2016, sejalan dengan strategi Perseroan untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya, dan menyeimbangkan pendanaan dari dalam dan luar negeri.

- **Utang pajak**

Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp93.541 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp23.092 juta atau 32,8% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp70.449 juta. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan utang pajak penghasilan untuk pembayaran dividen interim tunai untuk tahun buku 2016 yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016, dimana utang pajak tersebut jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2017, dan peningkatan nilai taksiran pajak penghasilan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015.

- **Beban yang masih harus dibayar**

Jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp190.240 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp49.654 juta atau 35,3% dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp140.586 juta. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan pencadangan bonus dan tunjangan karyawan.

- **Imbalan pasca-kerja**

Jumlah imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp140.392 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp28.425 juta atau 25,4% dibandingkan dengan jumlah imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp111.967 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan (jumlah karyawan yang berhak mendapatkan imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 5.316 orang, atau peningkatan sebesar 12,1%). Hanya karyawan tetap yang berhak memperoleh imbalan pasca-kerja.

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.251 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp248 juta atau 24,7% dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.003 juta. Utang dividen disebabkan oleh distribusi dividen interim berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi dan dividen tunai final berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- **Utang lain-lain**

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp139.914 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp30.423 juta atau 27,8% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp109.491 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang terhadap supplier dan rekanan asuransi yang masih dalam proses.

## **Ekuitas**

Ekuitas Perseroan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh, ditambah dengan komponen modal lainnya, seperti tambahan modal disetor dan laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi tingkat ekuitas adalah penyesuaian atas penghasilan komprehensif lainnya, yang berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai serta kerugian aktuarial program manfaat pasti yang dijalankan Perseroan.

Perseroan memiliki jumlah ekuitas di atas Rp4 triliun, jauh lebih besar daripada dengan jumlah yang diatur oleh POJK No.29/POJK.05/2014 yaitu minimal sebesar Rp100 miliar. Selain itu, Perseroan juga memiliki rasio utang bersih terhadap ekuitas yang cukup rendah, yaitu 2,0x per 30 Juni 2017, dibandingkan jumlah yang diizinkan oleh OJK sebesar 10x.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2017	2016	Nilai	%	2015	Nilai	%
Modal saham - nilai nominal Rp25 (2016, 2015: Rp 250) (nilai penuh) per saham							
Modal dasar - 20.000.000.000 saham (2016, 2015 : 2.000.000.000 saham)							
Modal ditempatkan dan disetor penuh -15.967.115.620 saham (2016 : 1.596.711.562 saham, 2015 : 1.565.959.562 saham)	399.178	399.178	-	0,0%	391.490	7.688	2,0%
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	553.286	-	0,0%	475.176	78.110	16,4%
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	-	0,0%	(4.044)	(248.116)	(6135,4)%
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	-	-	-	n/a	6.117	(6.117)	n/a
Penghasilan komprehensif lain							
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	(37.237)	(32.875)	(4.362)	(13,3)%	24.563	(57.438)	(233,8)%
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(72.514)	(49.390)	(23.124)	(46,8)%	(43.784)	(5.606)	(12,8)%
Saldo laba							
Telah ditentukan penggunaannya	72.733	31.696	41.037	129,5%	22.374	9.322	41,7%
Belum ditentukan penggunaannya	3.925.160	3.604.949	320.211	8,9%	3.147.211	457.738	14,5%
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.588.446</b>	<b>4.254.684</b>	<b>333.762</b>	<b>7,8%</b>	<b>4.019.103</b>	<b>235.581</b>	<b>5,9%</b>

#### 30 Juni 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp4.588.446 juta atau meningkat sebesar Rp333.762 juta atau 7,8% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp4.254.684 juta.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba selama periode enam bulan pada tahun 2017 sebesar Rp361.248 juta atau 9,9% dibandingkan dengan jumlah saldo laba pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.636.645 juta. Hal ini mencerminkan kinerja positif hasil usaha Perseroan selama periode enam bulan tahun 2017 yang meningkat sebesar 54,5% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016.

#### 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.254.684 juta atau meningkat sebesar Rp235.581 juta atau 5,9% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp4.019.103 juta.

Peningkatan ini terutama disebabkan perolehan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp798.365 juta yang meningkat sebesar Rp148.077 juta atau 22,8% setelah dikurangi dividen interim sebesar Rp224.466 juta, dibandingkan tahun 2016.

Selain itu peningkatan ekuitas juga terjadi karena adanya penambahan modal disetor yang terjadi karena adanya pelaksanaan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan BFI melalui program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) dengan menerbitkan hak opsi untuk membeli saham kepada peserta program MESOP. Jumlah saham baru yang diterbitkan selama tahun 2016 adalah sebanyak 30.752.000 lembar, dengan nilai pelaksanaan hak opsi sebesar Rp2.205 per lembar saham (nilai penuh). Atas pelaksanaan hak opsi ini, modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat sebesar Rp7.688 juta, sementara tambahan modal disetor meningkat sebesar Rp78.110 juta.

Sementara itu, terjadi penurunan ekuitas yang berasal dari saham treasuri, dimana terdapat pembelian kembali saham Perseroan selama tahun 2016 sebesar Rp248.116 juta, sehingga saldo akhir saham treasuri per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp252.160 juta.

### **c. Rasio Keuangan Perseroan**

#### (1) Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat diukur dengan membandingkan antara total aset lancar terhadap total liabilitas lancar. Tingkat likuiditas Perseroan per 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar 1,5x, 1,7x dan 1,6x. Tingkat likuiditas ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancar, sehingga kemampuan membayar utang adalah tinggi.

#### (2) Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pinjamannya, yang diukur dengan membandingkan total pinjaman dengan total aset dan ekuitas. Tingkat solvabilitas aset Perseroan per 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 0,6x. Sedangkan tingkat solvabilitas ekuitas Perseroan per 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 2,1x, 1,8x dan 1,8x. Kedua rasio solvabilitas ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban pinjamannya.

(3) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan per 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar 23,8%, 19,3% dan 17,1%. Kenaikan imbal hasil ekuitas karena kenaikan laba bersih yang lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ekuitas.

(4) Imbal Hasil Investasi

Imbal Hasil Investasi atau *Return on Asset (ROA)* adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Imbal Hasil Investasi Perseroan untuk per 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar 9,7%, 8,5% dan 7,8%

(5) *Gearing Ratio*

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII. pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. *Gearing Ratio* Perseroan berturut-turut per 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar 2,0x, 1,8x dan 1,6x. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK.

#### d. Belanja Modal

Penambahan aset tetap Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp137.059 juta, Rp62.261 juta dan Rp86.939 juta.

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perseroan pada umumnya meliputi investasi dibidang infrastruktur teknologi Informasi dan penataan kantor-kantor cabang. Sumber dana pembelian barang modal tersebut sebagian besar menggunakan dana internal Perseroan. Dengan adanya investasi barang modal tersebut, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan kepada pelanggan dan konsumen. Seluruh pengeluaran barang modal tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

#### Analisa Arus Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2017	2016 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2016	2015	Nilai	%
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(1.004.617)	122.538	(1.127.155)	-919,8%	231.682	148.362	83.320	56,2%
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(120.011)	(28.431)	(91.580)	-322,1%	(50.438)	(75.890)	25.452	33,5%
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.241.278	(602.719)	1.843.997	305,9%	(793.089)	415.081	(1.208.170)	-291,1%
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	116.650	(508.612)	625.262	122,9%	(611.845)	487.553	(1.099.398)	-225,5%
Kas dan setara kas pada awal periode	165.388	777.233	(611.845)	-78,7%	777.233	289.680	487.553	168,3%
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>282.038</b>	<b>268.621</b>	<b>13.417</b>	<b>5,0%</b>	<b>165.388</b>	<b>777.233</b>	<b>(611.845)</b>	<b>-78,7%</b>

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

#### Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menggambarkan pergerakan kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.004.617 juta, meningkat sebesar Rp1.127.155 juta dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan penggunaan arus kas ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran untuk transaksi pembiayaan baru sebesar Rp1.564.136 juta atau 30,0% dibandingkan periode enam bulan pada tahun 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus kas bersih dari aktivitas operasi selama tahun 2016 adalah sebesar Rp231.682 juta, meningkat sebesar Rp83.320 juta atau 56,2% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp148.362 juta. Peningkatan ini terutama disumbangkan oleh penerimaan dari transaksi pembiayaan serta bunga dan lain-lain meningkat sebesar Rp970.328 juta di tahun 2016. Sementara itu jumlah pengeluaran kas meningkat sebesar Rp887.008 juta di tahun yang sama.

#### **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi berasal dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan investasi dan pembelian pada aset modal yang dilakukan oleh Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp120.011 juta, meningkat sebesar Rp91.580 juta dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan penggunaan arus kas ini terutama disebabkan oleh adanya uang muka untuk pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2016 adalah sebesar Rp50.438 juta, menurun sebesar Rp25.452 juta dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan aset tetap selama tahun berjalan, sementara belanja modal antara tahun 2016 dan 2015 hampir sama jumlahnya.

#### **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan menggambarkan pergerakan kas yang diperoleh dari transaksi pendanaan, baik pinjaman baru, pelunasan pinjaman maupun pembayaran bunga atas sumber pendanaan tersebut.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.241.278 juta, menurun sebesar Rp1.843.997 juta dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan penggunaan arus kas ini disebabkan karena jumlah pendanaan baru yang diterima melebihi jumlah kewajiban yang jatuh tempo selama periode enam bulan pada tahun 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp793.089 juta, meningkat sebesar Rp1.208.170 juta dibandingkan tahun 2015. Peningkatan arus kas bersih ini terjadi karena jumlah kewajiban yang jatuh tempo selama tahun 2016 yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendanaan baru yang diterima.

## V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Tahap II tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia No. 1 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0134738 tanggal 9 Mei 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060009.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017, yang telah mengambil keputusan untuk menyetujui perubahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dengan ratio 1 : 10 (satu dibanding sepuluh) yaitu dari nilai saham masing-masing

### 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 30 September 2017, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp juta)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881	42,81
Masyarakat di bawah 5%	8.129.133.960	203.229	50,91
<b>Sub-total</b>	<b>14.964.383.620</b>	<b>374.110</b>	<b>93,72</b>
Saham Treasuri	1.000.273.200	25.068	6,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.967.115.620</b>	<b>399.178</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.032.884.380</b>		

### 3. Pengurus dan Pengawas

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 25 tanggal 18 April 2017 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 17 tanggal 11 Agustus 2017 dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Nama</b>	<b>Masa Jabatan</b>
Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Johanes Sutrisno	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Alfonso Napitupulu	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Emmy Yuhassarie	2016 - 2021
Komisaris	:	Dominic John Picone	2015 - 2020
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	2015 - 2020
Komisaris	:	Cornellius Henry Kho	2017 - 2022
<b>Direksi</b>		<b>Nama</b>	<b>Masa Jabatan</b>
Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	2016 - 2021
Direktur	:	Sudjono	2014 - 2019
Direktur	:	Sutadi	2014 - 2019
Direktur Independen	:	Sigit Hendra Gunawan	2016 - 2021
Direktur	:	Andrew Adiwijanto	2017 - 2022

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### 4. Perjanjian Penting Dan Komitmen

**Perjanjian Kerjasama Penyaluran/Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (Joint Financing)**

Berikut ini adalah perubahan pada Perjanjian Pemberian Pinjaman sejak terbitnya Informasi Tambahan terakhir:

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Joint Financing) CRO.KP/022/KS/15 (Joint Financing) No.60 tanggal 20 Februari 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Pembiayaan Bersama (Joint Financing)	Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	66 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan <b>19 Agustus 2020</b>
2.	Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Joint Financing) CRO.KP/097/PKS/2015 (Joint Financing) No.58 tanggal 10 Juni 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Pembiayaan Bersama (Joint Financing)	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	1. Penarikan terhitung sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 2. Untuk Angsuran End User maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kerjasama yakni tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan <b>9 Mei 2019.</b>
3.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line No. 23 tanggal 3 Juni 2016 (Joint Financing)	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Joint Financing)	Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)	24 Bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian yakni tanggal 3 Juni 2016 s/d <b>2 Juni 2018</b>

### Perjanjian Kredit

Berikut ini adalah perubahan Perjanjian Sekuritisasi sejak terbitnya Informasi Tambahan terakhir:

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 22 Desember 2011 Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.34 tanggal 18 Juni 2013, keduanya dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 2 April 2014 Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.33 tanggal 22 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta Jo Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.71 tanggal 22 April 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Fasilitas Kredit Kepada Multifinance (Revolving)	Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)	22 Desember 2016 s/d <b>21 Desember 2017</b>

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
	No.26 tanggal 8 Juni 2017 keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta				
2.	Akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka No.77 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.519/PP/PWK/CBD/IX/2016 tanggal 7 November 2016 , dibuat dibawah tangan	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")	Term Loan (Uncommitted)	Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)	19 November 2016 – <b>19 November 2017</b>
3.	Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 10 Mei 2013, dibuat dihadapan Kemas Anriz Nazaruddin Halim. S.H.,MH, Notaris di Kota Jakarta Barat beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.519A/PP/PWK/CBD/IX/2016 tanggal 7 November 2016 , dibuat dibawah tangan	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")	Working Capital (Kredit Berjangka)	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	19 November 2016 – <b>19 November 2017</b>
4.	Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. 03 tanggal 3 November 2015, dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat dan perubahannya yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM. 16/0784/ADD/FI tanggal 3 Mei 2016 jo. Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM/17/01181/ADD/FI tanggal 20 Juni 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 0226/SK/MF/WB/07/2017	PT Bank Permata Tbk	Money Market	Rp100.000.000.000,-	28 Maret 2017 s/d <b>31 Desember 2017</b>
5.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan (Ketentuan Khusus) No.64 tanggal 31 Maret 2010, dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang	PT Bank Permata Tbk	Receivable Financing	Rp150.000.000.000,-	Jangka Waktu Fasilitas 28 Maret 2017 s/d <b>31 Desember 2017</b>  Jangka waktu pembayaran kembali atas fasilitas dalam waktu minimal 6 bulan dan

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
	Pembiayaan Kendaraan No. RF/16/0783/AMD/FI tanggal 3 Mei 2016 jo. Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. KK/17/01180/AMD/F1 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 0226/SK/MF/WB/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup				maksimal 36 bulan, kecuali mobil baru dan bekas tidak melebihi 48 bulan sejak dilakukannya penarikan fasilitas
6.	Surat Fasilitas (Dengan Komitmen) tanggal 27 Januari 2015 jo. Facility Letter (Committed) and Master Credit, dibuat dibawah tangan	Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	Term Loan	USD30.000.000	3 tahun dari tanggal penarikan terakhir 12 Februari 2018 sampai dengan <b>12 Februari 2021</b>
7.	USD105.000.000 Secured Syndicated Term Loan Facilities Agreement tanggal 29 July 2015 dibuat di bawah tangan	Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Mandated Lead Arranger and Bookrunner) Lembaga-lembaga Keuangan (Original Lenders) Standard Chartered Bank (Hongkong) Limited (Agent) PT Bank Central Asia Tbk (Security Agent)	Term Loan	US105.000.000.	3 tahun dari tanggal penarikan terakhir yaitu tanggal 9 November 2015 sampai dengan <b>9 November 2018</b>
8.	Ketentuan Kredit Induk (Dng Komitmen)/ Penerima Pinjaman Tunggal Dng Jaminan Jo. Surat Fasilitas tanggal 4 April 2017	Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	Committed Senior Secured-Term Loan	USD 20.000.000	1 Tahun terhitung 4 April 2017 sampai dengan <b>4 April 2018</b>
9.	USD 50.000.000 Secured Term Loan Facility Agreement tanggal 8 June 2015 Jo.Amandemen tanggal 1 Oktober 2015, keduanya dibuat di bawah tangan	Emirates NBD Capital Limited (Mandated Lead Arranger) Lembaga-lembaga Keuangan (Original	Term Loan	USD50.000.000 (Tranche A : USD 40.000.000 dan Tranche B : USD10.000.000)	<i>Jangka Waktu Trance A dimulai sejak dari tanggal penarikan 22 Juni 2015 sampai dengan 36 Bulan yakni pada <b>21 Juni 2018</b></i>  Jangka Waktu

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
		Lenders) PT Bank Central Asia Tbk (Security Agent)			Trance B dimulai sejak dari tanggal penarikan 13 Juli 2015 sampai dengan 12 Bulan yakni pada 12 Juli 2016
10.	USD 50.000.000 Secured Bilateral Term Loan Facility Agreement tanggal 19 Maret 2015, dibuat di bawah tangan	Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch (Mandated Lead Arranger sekaligus sebagai Agent dan sebagai Original Lender) PT Bank Central Asia Tbk (Security Agent)	Term Loan	USD 50.000.000	3 Tahun sejak tanggal Penarikan terakhir yakni terhitung tanggal 29 Juni 2015 s/d <b>28 Juni 2018</b>
11.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market No.PKS.071/DIR/FINTF/IX/2015 tanggal 14 September 2015, dibuat dibawah tangan*) Jo. Addendum I No. PKS/067/DIR/FINTF/IX/2016 tanggal 27 September 2016	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)	Fasilitas Money Market	Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)	Surat Keterangan Bank BTPN surat perpanjangan sementara berlaku efektif 7 September 2017 s/d <b>27 Desember 2017</b>
12.	Perubahan Perjanjian Kredit No.006/IBD-MM/Leg/13/Per.II tanggal 23 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan*) Jo. Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.III tanggal 2 November 2016 dan telah dilegalisir oleh Ira Iswardani,S.H., Notaris di Kabupaten Serang dengan Nomor 74/LEG/XI/2016 tanggal 2 November 2016	PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk	Fasilitas Money Market	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	Hingga tanggal 31 Agustus 2017 (Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas PMM) *)
13.	Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 43 tanggal 13 Juni 2017, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat	PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk	Fasilitas Kredit III	Rp. 250.000.000.000,-	39 Bulan terhitung sejak tanggal pengikatan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.
14.	Akta Perjanjian Kredit No. 603 tanggal 22 April 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 604 tanggal 16 Mei 2016, dibuat dihadapan Yunita Aristina, SH.,M.KN, Notaris di Jakarta Utara	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Kredit Modal Kerja Umum (Non Revolving)	Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah)	<b>36 Bulan</b> sejak tanggal <u>Penarikan Kredit</u> tidak termasuk masa penarikan kredit
15.	Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pembiayaan modal kerja usaha multifinance	Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah)	1. Jangka waktu fasilitas kredit maksimal <b>45 bulan</b> sejak tanggal akad

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
		(BPD Jabar & Banten Tbk)			penandatanganan perjanjian kredit 2. Jangka waktu kredit per penarikan <b>36 bulan</b> sejak tanggal penarikan kredit tidak termasuk masa penarikan kredit
16.	Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 22 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Veronica Indrawati, S.H., Notaris Tengerang Selatan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Pembiayaan modal kerja usaha perusahaan pembiayaan.	Rp. 250.000.000.000,-	1. Jangka waktu fasilitas kredit maksimal <b>41 bulan</b> sejak tanggal akad penandatanganan perjanjian kredit 2. Jangka waktu kredit per penarikan <b>36 bulan</b> sejak tanggal penarikan kredit tidak termasuk masa penarikan kredit yakni <b>22 Agustus 2020</b>
17.	Akta Perjanjian Kredit No. 16-0225LN tanggal 30 Juni 2016 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0125LN tanggal 30 Juni 2017 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0282-GC-LN tanggal 5 September 2017, dibuat dibawah tangan	The Bank Of Tokyo-Mitshubishi UFJ, LTD	Facility Limit	USD 10.000.000,- (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)	Jangka waktu ketersediaan tanggal 5 September 2017 s/d 30 Juni 2018, Tanggal Pembayaran kembali yang terakhir tanggal <b>31 Desember 2018</b>
18.	Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Mei 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Noataris di kota Administrasi Jakarta Selatan, jo. Addendum I No. 01/UT/III/2017 tanggal 10 Maret 2017	PT United Tractors Tbk	Fasilitas Pembiayaan Pembelian Alat-alat berat	Rp. 800.000.000.000,- (Delapan ratus miliar Rupiah)	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2016 dan akan berakhir pada "Tanggal Pengakhiran" yaitu maksimal <b>4 tahun</b> sejak tanggal penggunaan pinjaman yang terakhir yang masih dalam periode ketersediaan.
19.	Akta Perjanjian Fasilitas No. 20 tanggal 20 Juni 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 30 Juni 2016, yang mana kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Urniyati, S.H., sebagai Pengganti Notaris dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,	Bank Of China Ltd.,	Fasilitas Pinjaman Berjangka (Term Loan)	Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah)	<b>36 (tiga puluh enam) Bulan</b> sejak tanggal terakhir pencairan fasilitas (Penarikan kredit) atau akhir dari masa ketersediaan,

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
	M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat				mana yang lebih dulu
20.	Perjanjian Fasilitas No. 6/FA/ANZ/NEW/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M, Notaris di Jakarta	PT BANK ANZ INDONESIA	Fasilitas Pinjaman Berjangka (Term Loan)	USD 20.000.000	Peminjaman <b>12 Bulan</b> setelah tanggal penarikan terakhir fasilitas
21.	Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 140 tanggal 30 Agustus 2016 dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, jo. Perubahan I Perjanjian Kredit No. 122/2M/2017 tanggal 27 Februari 2017, jo. Perubahan II Perjanjian Kredit No. 236/3/M/2017 tanggal 30 Maret 2017, jo. Perubahan III Perjanjian Kredit No. 627/2/M/2017 tanggal 30 Agustus 2017	PT BANK KEB HANA INDONESIA	Fasilitas Kredit Money Market Line	Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	1 Tahun atau 30 Agustus 2017 s/d <b>30 Agustus 2018</b> dengan jangka waktu penarikan minimum 1 bulan dan maksimum 6 bulan.
22.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/142/KMK/2016 Akta No. 43 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d <b>14 Agustus 2021</b>.</li> <li>2. Jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d <b>14 Agustus 2017</b>.</li> <li>3. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung tanggal Penarikan Fasilitas Kredit, terhitung tanggal 15 Agustus 2015 s/d <b>14 Agustus 2019</b></li> </ol>
23.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/191/KMK/2016 Akta No. 58 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)	1. Jangka waktu Penarikan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian, yaitu tanggal 26 Oktober 2016 s/d <b>14 Agustus 2017</b>

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
					2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> tanggal penarikan Fasilitas Kredit
24.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/034/KMK/2017 Akta No. 59 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)	1. Jangka waktu penarikan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal <b>29 Maret 2018</b> . 2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> dari tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.
25.	Perjanjian Fasilitas US\$ 10,000,000 tanggal 11 Oktober 2016 ("Facility Agreement/Perjanjian") dan telah dilegalisasi oleh Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang dengan No. 1195/L/BcH/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016	JA MITSUI LEASING SINGAPORE PTE.LTD	Pembiayaan	US\$ 1.000.000 dan dalam kelipatan US\$ 100.000	11 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal pengakhiran Fasilitas <b>10 Januari 2020</b>
26.	Syarat Umum Kredit ("SUK") Bank CIMB Niaga 2015 Rev.05 tanggal 22 Desember 2016 Nomor 199/SUK/CB/JKT/2016 dan telah dilegalisir oleh Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 239/L/XII/2016 tanggal 2 November 2016 jo Perjanjian Kredit 22 Desember 2016 Nomor 200/CB/JKT/2016 dan telah dilegalisir oleh Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 240/L/XII/2016 tanggal 2 November 2016	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pembiayaan Modal Kerja	Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah)	Maksimal 48 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan tanggal <b>22 Desember 2020</b>
27.	Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Maret 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk	Fasilitas Installment Loan	Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah)	1. Batas waktu penarikan 10 Maret 2017 dan berakhir 10 September 2017. 2. Jangka waktu kredit <b>3 Tahun</b> 3. Availability 6 bulan dari tanggal penandatanganan
28.	Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement tanggal 12 Juni 2017	1. BFI (Peminjam) 2. The Bank of	Facility Loan Agreement	USD. 100.000.000	Pembayaran kembali Anggsuran sesuai tanggal jatuh tempo :

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
		Tokyo-Mitshubishi (Pemegang Mandat) 3. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Pemegang Mandat) 4. Standard Chartered Bank (Hongkong) Ltd (Agen) 5. PT. BCA Tbk (Agen)			1. 9 bulan 2. 12 bulan 3. 15 bulan 4. 18 bulan 5. 21 bulan 6. 24 bulan 7. 27 bulan 8. 30 bulan 9. 36 bulan Yang semuanya setelah tanggal penggunaan pinjaman

Keterangan:

\*) Berdasarkan Surat Keterangan BFI tanggal 12 Oktober 2017 bahwa perubahan perjanjian kredit No.74/LEG/XI/2016 tanggal 2 November 2016 PT Bank Panin Tbk sedang dalam proses perpanjangan.

Perjanjian-perjanjian penting tersebut di atas telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

#### Perjanjian Kerjasama Dengan Dealer Kendaraan Bermotor

Dalam menunjang kegiatan usahanya Perseroan telah bekerja sama dengan *dealer-dealer* kendaraan bermotor. Perseroan menjalin kerjasama dengan sekitar 2.000 *dealer* kendaraan bermotor.

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang Obligasi (*negative covenants*), sesuai surat pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2017

Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5 % (nol koma lima persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017, sesuai surat pernyataan Perseroan tanggal 16 Oktober 2017.

#### 5. Sumber Daya Manusia

Penekanan pada Nilai-Nilai Dasar Perseroan telah menempatkan sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam Perseroan. Adapun Nilai-Nilai Dasar Perseroan adalah Giat Memperbaiki Diri Secara Berkesinambungan (*Grow and Improve Continuously*), Saling Menghormati dan Peduli (*Respect & Care*), Layanan Yang Memuaskan kepada Pelanggan (*Excellent Service*), Memiliki Integritas Sepenuhnya (*Absolute Integrity*), dan Saling Percaya & Semangat Kerjasama Team (*Trust & Team Spirit*). Perseroan secara aktif merekrut tenaga kerja baru untuk dijadikan calon pemimpin masa depan Perseroan. Komitmen atas pengembangan sumber daya manusia dibuktikan dengan terus menerus memberikan pelatihan internal dan eksternal secara intensif; baik dari sisi teknis maupun sisi kemampuan manajerial dan kepemimpinan, agar tingkat profesionalitas karyawan senantiasa meningkat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik dan bersih, karyawan juga dididik untuk senantiasa memperhatikan etika bisnis dan mengikuti pedoman prinsip-prinsip berusaha yang telah diatur Perseroan.

#### Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan memperkerjakan 9.661 karyawan.

Status Karyawan	30 September		2016		31 Desember	
	2017		2015		2015	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Tetap	5.789	60%	5.322	60%	4.786	60%
Kontrak (tidak tetap)	3.873	40%	3.619	40%	3.138	40%
<b>Jumlah</b>	<b>9.662</b>	<b>100%</b>	<b>8.941</b>	<b>100%</b>	<b>7.924</b>	<b>100%</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	30 September		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Master (S2 & S3)	45	0.5%	42	0.5%	40	0.5%
Sarjana (S1)	5.730	59.3%	5.151	57.6%	4.436	56.0%
Sarjana Muda (D3)	1.135	11.7%	1.109	12.4%	996	12.6%
SMU	2.731	28.3%	2.614	29.2%	2.425	30.6%
Sampai SLTP	21	0.2%	25	0.3%	27	0.3%
<b>Jumlah</b>	<b>9.662</b>	<b>100.0%</b>	<b>8.941</b>	<b>100.0%</b>	<b>7.924</b>	<b>100.0%</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

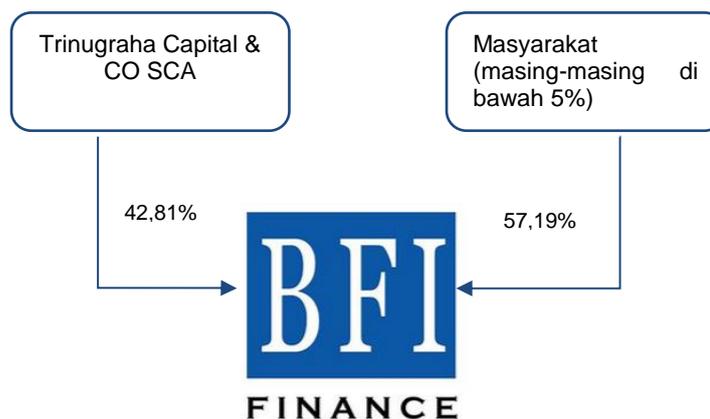
Jenjang Manajemen	30 September		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Dewan Komisaris	8	0.1%	6	0.1%	6	0.1%
Direksi	5	0.1%	5	0.1%	4	0.1%
Manajer Senior	145	1.5%	127	1.4%	114	1.4%
Manajer Yunior	478	4.9%	435	4.9%	369	4.7%
Officer	2.536	26.2%	2.164	24.2%	1.997	25.2%
Staf	6.490	67.2%	6.204	69.4%	5.434	68.6%
<b>Jumlah</b>	<b>9.662</b>	<b>100.0%</b>	<b>8.941</b>	<b>100.0%</b>	<b>7.924</b>	<b>100.0%</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Jenjang Usia	30 September		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
<25	1.961	20.3%	1.872	20.9%	1.666	21.0%
25 - 30 Tahun	4.855	50.3%	4.448	49.7%	3.953	49.9%
31 - 40 Tahun	2.498	25.8%	2.319	25.9%	2.039	25.7%
41 - 50 Tahun	314	3.3%	274	3.1%	244	3.1%
>50 Tahun	34	0.4%	28	0.3%	22	0.3%
<b>Jumlah</b>	<b>9.662</b>	<b>100.0%</b>	<b>8.941</b>	<b>100.0%</b>	<b>7.924</b>	<b>100.0%</b>

## 6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawas Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan

Berikut adalah diagram hubungan kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum per tanggal 30 September 2017:



Sumber: Perseroan

### Hubungan Pengurus dan Pengawas

Nama	Perseroan	Trinugraha Capital & Co SCA
Kusmayanto Kadiman	PK	-
Johannes Sutrisno	KI	-
Alfonso Napitupulu	KI	-
Emmy Yuhassarie	KI	-

Dominic John Picone	K	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Cornellius Henry Kho	K	-
Francis Lay Sioe Ho	PD	-
Sudjono	D	-
Sutadi	D	-
Andrew Adiwijanto	D	-
Sigit Hendra Gunawan	DI	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris                      KI : Komisaris Independen  
 PD : Presiden Direktur                      D : Direktur  
 K : Komisaris                                      DI : Direktur Independen

## 7. Keterangan Mengenai Entitas Anak PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT")

### a. Riwayat Singkat

FIT didirikan berdasarkan akta pendirian No. 04 tanggal 15 Setember 2017 di hadapan Herna Gunawan, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-8003.HT.01.01.TH.97 tanggal 15 Agustus 1997, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah register No. 1959/BH.09.05/III/98 tanggal 9 Maret 1998 serta telah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43/1998, tambahan 2819/1998 tanggal 20 Mei 1998.

Perusahaan berkantor pusat, di BFI Tower, Lantai 2 Sunburts CBD Lot 1.2 Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Kel. Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

BFI telah melaporkan Laporan Informasi atau Fakta Material mengenai pendirian anak perusahaan bernama PT Finansial Integritas Teknologi ("FIT") yang tertuang dalam surat BFI No. Corp/FL/L/X/17-0148 tanggal 2 Oktober 2017 kepada (i) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar modal, tembusan (ii) Direksi PT Bursa Efek Indonesia, (iii) Kustodian Sentral Efek Indonesia.

### b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### c. Struktur Modal

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per-saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000,00,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- PT BFI Finance Indonesia Tbk	2.499	2.499.000.000,-	99,9
- Tuan Lay Sioe HO (Francis Lay Sioe HO)	1	1.000.000,-	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	

### d. Manajemen dan Pengawasan

#### Direksi

Direksi : Tjiu Herman Handoko

#### Dewan Komisaris:

Komisaris : Lay Sioe Ho (Francis Lay Sioe Ho)

**Keterangan :**

1. Guna pemenuhan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT") sebagai Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sedang memproses perijinan-perijinan yang diperlukan terkait perijinan dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan dan Pajak, Ketenagakerjaan dan Perijinan lain yang diperlukan sebagai pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang telah disampaikan dalam surat pernyataan FIT berdasarkan tanggal **16 Oktober 2017**
2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan surat pernyataan FIT tanggal **16 Oktober 2017**, FIT tidak memiliki aset baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan surat pernyataan FIT tanggal **16 Oktober 2017**, FIT belum menandatangani perjanjian - perjanjian dengan Pihak Ketiga maupun dengan Pihak Terafiliasi (kecuali Perjanjian Sewa Menyewa Ruang dengan PT BFI Finance Tbk) dan Perjanjian utang/perjanjian fasilitas kredit baik dengan bank maupun dengan lembaga pembiayaan bukan bank dimana FIT berkedudukan sebagai debitur.
4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai surat pernyataan FIT tanggal **16 Oktober 2017** tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.
5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai surat pernyataan tanggal **16 Oktober 2017** Direksi dan Komisaris FIT dalam jabatannya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

**8. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi dan Komisaris menyatakan bahwa setiap Direksi dan Komisaris PT BFI Finance Indonesia Tbk tidak sedang terlibat dalam perkara apapun. Perseroan saat ini tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau PKPU, maupun dalam suatu sengketa lainnya diluar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material, serta tidak terdapat somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, kecuali 55 (lima puluh lima ) perkara/pengaduan yang dihadapi oleh Perseroan dibawah ini:

1. Nomor 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Ahesa Panji Buana selaku Tergugat dan Lalu Eka selaku Turut Tergugat.
2. Nomor 35/Pdt.G/2011.PN. Mkt jo no 415/PDT/2012/PT.SBY antara Edy Setiawan selaku Penggugat dan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
3. Nomor 205/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 1 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Hermanto selaku Tergugat I dan Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II.
4. Nomor 304/PDT.G/2012/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Fransiskus Borgias selaku Tergugat I dan Novy Sumadi selaku Tergugat II.
5. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Karawang antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Ruhyat Supriatna selaku Pengadu.
6. Nomor 376/PDT.G/2014/PN.MND antara Gunawan Pontoh selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk (tertulis di gugatan Pimpinan PT. Busan Finance Indonesia Cab. Manado) selaku Tergugat
7. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Andri Rustiaji selaku Pengadu.
8. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sunarmen selaku Pengadu.
9. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Selamat Suyanto selaku Pengadu
10. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Ngatiwan selaku Pengadu.

11. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Titik Murda Ningsih selaku Pengadu.
12. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Trimo selaku Pengadu.
13. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Jumiin selaku Pengadu.
14. Nomor 10/PDT.G/2015/PN.PGP jo Nomor 10/PDT/2016/PT.Bbl antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II melawan Tom Donnie selaku Penggugat, Sunkie alias Asen selaku Tergugat I dan Dewi selaku Turut Tergugat.
15. Nomor 53/PDT.G/2015/PN.BLT jo Nomor 418/PDT/2016/PT.SBY antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Turut Tergugat II melawan Cucuk Yuwono selaku Penggugat I, Tina Sugiarti selaku Penggugat II, Mahesa Yoga Sunardi alias Gandi selaku Tergugat dan Sunardi selaku Turut Tergugat I.
16. Nomor 16/PDT.G/2015/PN.TBN antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Sugianang selaku Penggugat.
17. Nomor 207/PDT.G/2015/PN.AMB antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II melawan Julius Noya selaku Penggugat, Drs. Iksan Iskandar (pimpinan PT. Rianti Rezeki Abadi) selaku Tergugat I, Dit Lantas Polda Maluku selaku Tergugat III, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selaku Tergugat IV.
18. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Solok antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Edison selaku Pengadu.
19. Nomor 29/PDT.G/2015/PN.SPT antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Miftahul Muntaha selaku Tergugat.
20. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Berlin Siahaan selaku Pengadu.
21. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sulaiman selaku Pengadu.
22. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Samali selaku Pengadu.
23. Perkara Pengaduan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasurnan antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Iswono selaku Pengadu.
24. Nomor 294/PDT.G/2016/PN.DPS antara Kepala Kantor BFI Jakarta Pusat cq Kepala Kantor Denpasar-Bali selaku Turut Tergugat II melawan Jula Katherine selaku Penggugat I, Esra Berthania Patricia Hidayat, SE selaku Penggugat II, Yemima Kezia Hidayat selaku Penggugat III, Wayan Sumitra selaku Tergugat I, Ir Ketut Harta Yasa selaku Tergugat II, Direktur PT BPR Tata Anjung Sari selaku Turut Tergugat I dan Kepala Kantor Adira pusat cq Kepala Kantor Cabang Adira Denpasar Bali selaku Turut Tergugat III.
25. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Abdul Rozak selaku Pengadu.
26. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Maruli Tua Sinurat selaku Pengadu.
27. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hasan Basri Ginting selaku Pengadu.  
  
Nomor 270/PDT.SUS.BPSK/2016/PN.CBI antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Ciarli selaku Tergugat.
28. Nomor 163/PDT.G/2016/PN.Dpk PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II melawan Fia Farida Damayanti, Mieke Banaatmadja, H. R Perry Achmad Fuqron, R Barin Rizal Al Amin, M Iqbal Danaatmadja, RD A Umarlufti Danaatmadja dan Tino Akhmat Syafrudin selaku Penggugat, PT. Balai Lelang Indonesia selaku Tergugat I, Edi Supriadi selaku Tergugat III,

Dyah Petty selaku Tergugat IV, Notaris RMS Soenarto selaku Tergugat V, Wikanto Panca Atmanto selaku Tergugat VI, Notaris Isa Meilia selaku Tergugat VII, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor selaku Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kota Depok selaku Turut Tergugat II.

29. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hotma Tua Sitompul selaku Pengadu.
30. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Herry selaku Pengadu (ahli waris Bambang Yamin).
31. Nomor 82/PDT.G/2016/PN.Ktg antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I melawan Muhdar Potabuga selaku Penggugat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Negeri Kotamobagu selaku Tergugat II.
32. Nomor 145/PDT.SUS-BPSK/2016/PN. BKN antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Badal Gultom selaku Tergugat.
33. Nomor 150/PDT.SUS.BPSK/2016.PN.Bkn antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Supriyadi selaku Tergugat.
34. Nomor 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS dalam perkara Kepailitan Tontje Thenoch dan Henry Thenoch selaku Termohon dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku salah satu Kreditur.
35. Nomor 02/PDT.SUS-BPSK/2017/PN.BKN antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Rasiman selaku Tergugat.
36. Nomor 18/PDT.G/2017/PN.PBR antara Ivan Dhori Suranta Meliala selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
37. Nomor 14/PDT.G/2017/PN.SKT antara RM Aditya Kuspranindya selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I, Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepolisian Resor Karanganyar cq Kepolisian Sektor Colomadu selaku Tergugat II dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta selaku Turut Tergugat.
38. Nomor 17/PDT.SUS.BPSK/2017/PN.BLS jo Nomor 039 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Lasriana Sinaga selaku Tergugat.
39. Nomor 101/Pdt.G/2017/PN.Bdg antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Iwan Suhendar selaku Penggugat.
40. Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Skh antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Sufaat Hosain selaku Penggugat.
41. Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Gto antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Abdul Manan Yusuf selaku Penggugat.
42. Nomor 127/Pdt.G/2017/PN.MND antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I melawan Philipus Yonathan Diawang selaku Penggugat dan PT. Sinar Gorontalo Berlian Motor selaku Tergugat II.
43. Nomor 14/PDT/Sus-BPSK/2017/PN.Mar antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Mohamad Kosim Prayogo selaku Tergugat dan PT. Asuransi Sinar Mas selaku Turut Tergugat.
44. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Harawi selaku Pengadu.
45. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bukit Tinggi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Yeni Helmida Pengadu.
46. Nomor 328/Pdt.G/2017/PN.TNG antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Jasmin Riyadi selaku Penggugat.
47. Nomor 127/PDT.G/2017/PN/PLG antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Emmy Natalia, SH selaku Penggugat.

48. Nomor 13/dt.G/2017/PN.Rbg antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk pusat selaku Tergugat I, PT. BFI Finance Indonesia Tbk cabang Rembang selaku Tergugat II, PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat III melawan Kusnadi selaku Penggugat.
49. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hariyadi selaku Pengadu.
50. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sumiyati selaku Pengadu.
51. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kotamobagu antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Fifi Aprianty Lantong selaku Pengadu.
52. Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Pbr antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk pusat selaku Tergugat melawan Ahmad Muklis selaku PENGGUGAT.
53. Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.GTO antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk pusat selaku Tergugat melawan Mohammad Yusran Tanaijo selaku PENGGUGAT.
54. Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SKH antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk pusat selaku Tergugat melawan Aris Nugrohoselaku PENGGUGAT.
55. Nomor 29/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.SBY dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ir. I Gede Agus Hardiawan selaku Termohon dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku salah satu Kreditur.

### 9. Keterangan Tentang Aset Tetap

Berikut ini adalah daftar tambahan aset tetap tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan berikut status kepemilikan tanah setelah per tanggal 30 September 2017 dengan nilai buku sebesar Rp.263.039 juta, dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
1.	HGB No.247	8 Agustus 1997	90	Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat	24 Sept. 2027	Perseroan
2.	HGB No.18	22 Desember 1999	61	Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali	21 Des. 2019	Perseroan
3.	HGB No.577	14 Oktober 1996	76	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2013	Perseroan
4.	HGB No.578	14 Oktober 1996	79	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2013	Perseroan
5.	HGB No.690	25 Oktober 1996	80	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2013	Perseroan
6.	HGB No.691	25 Oktober 1996	64	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2013	Perseroan
7.	HGB No.692	25 Oktober 1996	117	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2013	Perseroan
8.	HGB No.317	11 Oktober 1996	119	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2016	Perseroan
9.	HGB No.318	11 Oktober 1996	116	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2016	Perseroan
10.	HGB No.246	9 Juli 1996	118	Desa/Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten/ Kotamadya	tahun 2035	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
11.	HGB No.9	15 Juli 1997	200	Palembang, Sumatera Selatan Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2027	Perseroan
12.	HGB No.494	31 Agustus 1995	88	Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	24 September 2014	Perseroan
13.	HGB No.1506	18 Mei 2006	700	Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara	17 Mei 2026	Perseroan
14.	HGB No.982	11 Oktober 2005	206	Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi	15 Februari 2027	Perseroan
15.	HGB No.349 Ex SHM No. 457	27 April 1995	638	Desa Wumialo, Kec. Kota Utara, Kotamadya Dati II Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara	27 September 2037	Perseroan
16.	HGB No.00022	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan
17.	HGB No.00023	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan
18.	HGB No.173	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037	Perseroan
19.	HGB No.174	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037	Perseroan
20.	HGB No.782	18 September 2008	2.062	Kel. Delima, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau	18 September 2028	Perseroan
21.	HGB No.848	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan
22.	HGB No.847	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan
23.	HGB No.44	10 Mei 2010	468	Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	10 April 2040	Perseroan
24.	HGB No.10.034	30 April 2003	75	Perumahan Puri Mutiara Blok A/80, Sunter, Jakarta Utara	3 Februari 2027	Perseroan
25.	HGB No.190/Kt.B	5 Juni 2008	250	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung	23 Maret 2030	Perseroan
26.	HGB No.4151	19 September 2006	73	Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak	3 September 2036	Perseroan
27.	HGB No.556	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan
28.	HGB No.557	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan
29.	HGB No.42	30 Juli 2007	140	Jl. Basuki Rahmat, Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	28 Desember 2029	Perseroan
30.	HGB No.44	30 Juli 2007	140	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	14 Juni 2042	Perseroan
31.	HGB No.0004	25 Januari 2001	285	Jl. A. Yani km 7.8 Desa Kertak Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan	25 Agustus 2039	Perseroan
32.	HGB No.1996	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
33.	HGB No.1995	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan
34.	HGB No.06032	18 November 2009	7.050	Sunburst BSD City Lot I2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Banten	15 Juli 2027	Perseroan
35.	HGB No.6	26 September 1995	149	Jl. Hayam Wuruk No. 81, Jelutung, Jambi	9 Maret 2030	Perseroan
36.	HGB No. 4076	15 Mei 2009	65	Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi	24 September 2026	Perseroan
37.	HGB No.731	11 Juli 2011	159	Desa/Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	29 Maret 2023	Perseroan
38.	HGB No. 1524	14 November 2011	352	Jl.Soekarno Hatta, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan
39.	HGB No.403/ Desa Madegondo	29 Juli 1991 kemudian diperpanjang 20 tahun lagi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo No.13-550.1.33.16.2003 tanggal 22 Mei 2003	152	Desa/Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah setempat dikenal sebagai Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Sukoharjo 57552	21 Februari 2025	Perseroan
40.	HGBNo.40	24 Agustus 2010	530	Desa/Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur setempat dikenal sebagai Jl. Ngagel, Surabaya	24 Agustus 2040	Perseroan
41.	HGB No.58/RANOTANA	15 Februari 2012	217	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario , Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan
42.	HGB No.57/RANOTANA	15 Februari 2012	490	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario , Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan
43.	HGB No. 00279	9 Februari 2012	98	Jl.Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	8 Februari 2032	Perseroan
44.	HGB No.01070	29 Juli 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 Sept 2042	Perseroan
45.	HGB No.01071	24 September 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 September 2042	Perseroan
46.	HGB No.6486	9 Desember 2011	325	Jl.Jend.Sudirman, RT 006, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	9 Desember 2031	Perseroan
47.	HGB No.315	4 Desember 2001	1.179	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Jl. Gatot Subroto Barat)	21 Desember 2041	Perseroan
48.	HGB No.11	17 Oktober 2012	142	Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (dahulu Kabupaten Maluku Utara), Provinsi Maluku Utara	17 Oktober 2042	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
49.	HGB 00517	26 Maret 2013	20	Kel.Karangpawitan, Kec.Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043	Perseroan
50.	HGB 00518	17 April 2013	900	Kel.Karangpawitan, Kec.Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043	Perseroan
51.	HGB No.1538	4 Mei 2012	900	Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan
52.	HGB No.00329	5 September 2006	255	Kel.Bende, Kec.Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	9 September 2043	Perseroan
53.	HGB No.00330	19 Desember 2008	210	Kel.Bende, Kec.Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	18 September 2043	Perseroan
54.	HGB No.01	28 Desember 2009	430	Kel.Kotabangun. Kec.Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara	14 Maret 2043	Perseroan
55.	HGB No.20218/Karunrung	17 Januari 2002	600	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan
56.	HGB No.20217/Karunrung	13 Juli 2009	409	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan
57.	HGB No.349	24 Mar 2016	72	Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kota Tangerang, Propinsi Banten setempat dikenal juga sebagai Kompek Balaraja Ultimate for Business Retail No. 3 A, Jalan Raya Serang Km. 24	24 Maret 2045	Perseroan
58.	HGB No.0024	25 Juli 2014	335	Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi ..... setempat dikenal juga sebagai Ruko Moh Hatta Center, Jalan Dr Moh, Hatta no. 21 D-E, RT.11/ RW.03	30 Juni 2044	Perseroan
59.	HGB No.006	21 Mei 2015	702	Jalan Prof.M.Yamin SH No.65-66 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jeluntung, Kota Jambi, Prov. Jambi	3 Juli 2035	Perseroan
60.	HGB No.00109	8 September 2016	1.102	Jalan Pulau Sumba No.7 Kel.Gebangrejo,Kec. Poso Tengah, Poso, Sulawesi Tengah	16 Agustus 2036	Perseroan
61.	HGB No. 08633	12 September 2017	2.170	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan
62.	HGB No. 08634	12 September 2017	1.250	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan
63.	HGB No. 08635	12 September 2017	990	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan jual beli/pengikatan jual beli atas bidang-bidang tanah berikut ini:

A. TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH BFI

No.	LOKASI	HGB/Hak Milik	LUAS (M2)	ALAS HAK PENGUASAAN	KETERANGAN	PERUNTUKAN
-----	--------	---------------	-----------	---------------------	------------	------------

1.	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali	Hak Milik No.5094	1.179	Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 3 November 2011 yang dibuat dihadapan Sri Andayani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Denpasar	Berdasarkan Surat Keterangan No.394/XI/Not/2011 tanggal 3 November 2011 dari Sri Andayani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Denpasar, diterangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.5094 tersebut masih dalam proses penurunan hak menjadi HGB dan balik nama menjadi nama BFI yang dilakukan melalui kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut di atas.	Tanah kosong
2.	Jl. Ahmad Yani By Pass Karawang	Hak Milik No.6260	900	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.20 tanggal 18 November 2010 yang dibuat dihadapan Ida Rosida Suryana, SH, MH, Notaris di Karawang	Berdasarkan Surat Pernyataan BFI tertanggal 11 April 2012 akan dilaksanakan jual-belinya oleh BFI pada waktu dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam PPJB No.20	Tanah kosong
3.	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	Hak Milik No.20169/Karunrung	600	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.43 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar	Berdasarkan Surat Keterangan dari Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar tertanggal 31 Oktober 2012 diterangkan bahwa SHM tersebut sedang dalam proses roya, penurunan Hak menjadi HGB, kemudian akan dibuatkan Akta Jual Beli dan diproses balik nama ke atas nama BFI pada kantor pertanahan Kota Makassar	Tanah kosong
4.	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	Hak Milik No.21507/Karunrung	409	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.43 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar	Berdasarkan Surat Keterangan dari Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar tertanggal 31 Oktober 2012 diterangkan bahwa SHM tersebut sedang dalam proses roya, penurunan Hak menjadi HGB, kemudian akan dibuatkan Akta Jual Beli dan diproses balik nama ke atas nama BFI pada kantor pertanahan Kota Makassar	Tanah kosong
5.	Perumahan Citra Land "Bay View City" yang berlokasi di Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Ambon, Maluku setempat dikenal juga dengan nama Jl. Wolter Monginsidi	Hak Milik No.612	14.505	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.200/200/B/TA/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan	Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas 100 m <sup>2</sup> , dan bangunan yang nantinya seluas 175 m <sup>2</sup> , dan berdasarkan Surat Pernyataan BFI tertanggal 10 Desember 2012 akan dilaksanakan jual-belinya oleh BFI pada waktu dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam PPJB No.200/200/B/TA/VII/11	Tanah kosong
6.	Sebidang Tanah di Provinsi Sulawesi Tengah, Kab.Poso, Kec. Poso, Kel. Gebangrejo	Hak Milik No. 1280	1.102	Jl. Pulau Sumba No. 7, Kel. Gebangrejo	Dalam Proses Balik nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk	Kantor Cabang
7.	Sebidang Tanah siap bangun di Kavling Commercial De Park –BSD City	PPJB	± 4.614	Kavling Commercial De Park	Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas ± 4.614, dan Berdasarkan PPJB dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk No.1000050382/PPJT/30KO/III/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang mengatur Jual Beli dengan syarat –syarat dalam PPJB tersebut.	Tanah Kosong

Aset tetap lainnya per tanggal 30 September 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Aset	Status Kepemilikan	Nilai
1.	Peralatan kantor	Hak milik	35.479
2.	Kendaraan	Hak milik	93.248
3.	Perabot dan perlengkapan	Hak milik	2.871
4.	Renovasi gedung kantor	Hak milik	21.575
5.	Aset dalam penyelesaian	Hak milik	31.892
<b>Total</b>			<b>185.065</b>

## 10. Asuransi

Untuk melindungi dan menjaga kelangsungan usaha, Perseroan mengasuransikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi yang digunakan Perseroan pada saat ini adalah seperti tercantum di table di bawah ini, dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Perseroan juga mewajibkan konsumennya untuk mengasuransikan kendaraan atau alat-alat berat dan barang modal lainnya yang dibiayai Perseroan. Perseroan menutup asuransi dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik.

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Jumlah Premi (Rupiah)
1	Asuransi Kendaraan Bermotor  Obyek Pertanggungan 232 Motor Operasional di seluruh Indonesia	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	02091021700002	11 Januari 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Motor 1.399.100.000,-  Pihak Ketiga 1.160.000.000,-	31.011.620,-
2	Asuransi Kendaraan Bermotor  Obyek Pertanggungan 407 Mobil Operasional di seluruh Indonesia	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	02091021700001	11 Januari 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	CASCO 50.618.500.000,-  Pihak Ketiga 20.350.000.000,-	1.630.155.435,-
3	Property All Risk Insurance	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011700095	6 Februari 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	247.642.296.731,27,-	211.209.292,90,-
4	Terrorism and Sabotage Consortium	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011700110	31 Januari 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Terrorisme & Sabotage (Logistic) 247.642.296.731,27,-  Terrorisme & Sabotage (infrastructure) 247.642.296.731,27,-	Terrorisme & Sabotage (Logistic) 74.327.689,02,-  Terrorisme & Sabotage (infrastructure) 74.327.689,02,-
5	Money Insurance (Cash in Transit)	PT Asuransi Bina Dana aRTA	01091031700013	9 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Max Limit 400.000.000,-/jalan  Total seluruh cabang max 3.000.000.000,-/hari	Tahunan Rp.900.000.000.000,00  Garansi Limit Max Rp.75.000,00 untuk setiap kejadian dan atau keseluruhan selama periode asuransi 45.942.500,-
6	Money Insurance (Cash In Safe/Cash in Cashier's Box)	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	01091121700012	9 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	Max Limit 5.000.000.000,-untuk kantor pusat dan 1.000.000.000,-/kantor cabang/gerai/lokasi  Total Nilai Pertanggungan 61.210.000.000,-	
7	Asuransi Resiko Gempa Bumi, Erupsi, Tsunami	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091011700275	20 Maret 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	324.074.634.384,-	68.740.047,94,-
8	General & Public Liability	PT Asuransi Bina Dana	01091091700005	9 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31	Limit pertanggungan 5.000.000.000,-	2.785.000,-

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Jumlah Premi (Rupiah)
		Arta Tbk			Desember 2017	Terdiri dari Akibat Kecelakaan 1.000.000.000,- dan Jiwa 10.000.000,-	
9	Asuransi Mesin Obyek Pertanggungan : 2 Unit Genset dan 1 Unit Lift yang ada di kantor pusat BFI	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091081700005	9 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	4.089.228.000,-	4.124.228,-
10	<i>Moveable All Risk</i> Obyek Pertanggungan : Mesin EDC, Notebook yang berada dimanapun diseluruh wilayah Indonesia	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091121700020	3 April 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	2.239.002.206,-	20.186.019,85,-
11	<i>Electronic Equipment Insurance (EEI)</i> Obyek Pertanggungan : Peralatan elektronik yang ada di kantor-kantor cabang BFI	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk	01091081700003	3 February 2017	31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017	32.869.289.084,-	11.867.944,07,-

Perseroan menyatakan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

#### 11. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000302170 tanggal pendaftaran 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- Nomor Pendaftaran: IDM000302170
- Tanggal Pendaftaran Merek: 21 April 2011
- Kelas Barang/Jasa: NCL9-36
- Jenis Barang/Jasa: Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan *real estate*; jasa sewa guna usaha secara *finance lease* dan *operating lease*; jasa pembiayaan konsumen; anjak piutang; jasa-jasa kartu kredit
- Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 September 2011

#### 12. Kantor Cabang

Adapun perkembangan kegiatan Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Berikut adalah lokasi kantor cabang Perseroan per tanggal 30 September 2017:

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
1	Kantor Cabang Biak Numfor	Rukan di Jl. Selat Sunda RT 006 RW 006, Kel. Fondo Biak Numfor, Kota Papua.	14 Mei 2013 s/d 13 Mei 2018	S
2	Kantor Cabang Jakarta Selatan	Rukan di Jl. Ciputat Raya No. 1C, RT 003 RW010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1 April 2016 s/d 31 Maret 2019	S
3	Kantor Cabang	Ruko di Jl. Merdeka No. 69,	1 Oktober	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
	Nabire	Pertokoam JDF	s/d 30 September 2020	
4	Kantor Cabang Tangerang	Sebuah bangunan rumah toko di Jl. MT. Haryono No.9, Kec. Tangerang, Kotamadya Tangerang	18 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2018	S
5	Kantor Cabang Citeureup	Ruko di Jl. Tegar Beriman I, Cibinong City Centre A/30 RT.05 RW 12, Kel. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat.	1 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2019	S
6	Kantor Cabang Semarang 2	Ruko di Jl. Taman Setiabudi A.8 RT.01 RW.18, Kec.Bayumanik, Semarang	1 Desember 2016 s/d 15 Desember 2019	S
7	Kantor Cabang Cikarang	Ruko Golden Boulevard Blok CC.5 No.3A, Jl. Niaga	-	MS
8	Kantor Cabang Makassar	Jl. Hertasning Baru (Aroepala)(Depan Perumahan Anging Mammiri), Kelurahan Karunrung	-	MS
9	Kantor Cabang Solo 2	Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Desa Madegondo	-	MS
10	Kantor Cabang Medan 2	2 buah Bangunan Rumah Toko 3 lantai total seluas 432 m2 terletak di Jl. Bambu IIO, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	10 November 2016 s/d 10 November 2018	S
11	Kantor Cabang Medan	Rukan di jl. Jl. Ir.H.Juanda No.26, Lingkungan IV, Kelurahan Sukadamai	1 Maret 2016 s/d 1 April 2018	S
12	Kantor Cabang Mataram	Jl. Brawijaya No.22 – 24 RT. 02, Lingk.Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan	1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2022	S
13	Kantor Cabang Bekasi 3	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 79 m2 terletak di Ruko Taman Jatimakmur Indah Blok A, Jl. Jatimakmur, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat	1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2020	S
14	Kantor Cabang Sengata	Ruko di Jl. Pendidikan Dalam (A. W. Syahrani), RT. 04 RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga	1 April 2014 s/d 1 April 2019	S
15	Kantor Cabang Dumai	Ruko di Jl. Kelakap Tujuh, Kelurahan Ratusima, Dumai	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
16	Kantor Cabang Samarinda	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6	-	MS
17	Kantor Cabang Sarolangun	Ruko di Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun, RT.06, No. 17, Kel. Sukasari	15 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021	S
18	Kantor Cabang Metro	Ruko di Jl. Jend. Sudirman No. 282, Kelurahan Imopuro	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021	S
19	Kantor Cabang Jakarta Utara 2	Rukan diatas tanah seluas 76 m2 terletak di Blok B-3 Jl. Bandegan Utara No. 80 Penjaringan, Jakarta Utara	9 Juni 2014 s/d 9 Juni 2019	S
20	Kantor Cabang Bulukumba	Ruko di Jl. Samratulangi, Dusun Laje, Desa Polewali	25 Juni 2016 s/d 25 Juni 2019	S
21	Kantor Cabang	Bangunan di Jl. Ahmad Yani No.	1 Januari 2016	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
	Rantau Prapat	104 A-B	s/d 1 Januari 2021	
22	Kantor Cabang Purwakata	Ruko di Jl. Veteran/Terusan Ibrahim Singadilaga, Ruko no. 5 - 6, Kel. Nagrikaler	31 Januari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
23	Kantor Cabang Bogor	2 unit Ruko 4 lantai diatas tanah seluas 220 m2 terletak di Jl. Raya Taju No. 39, Blok D-E, Bogor Timur, Jawa Barat	5 Maret 2014 s/d 5 Maret 2019	S
24	Kantor Cabang Cikupa	Bangunan di Blok M 19/01 Taman Raya Citra Raya, Kel. Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang.	15 November 2012 s/d 14 November 2017	S
25	Kantor Cabang Ujung Batu	Ruko di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Ujung Batu.	8 September 2016 s/d 8 September 2019	S
26	Kantor Cabang Padang	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 307.2m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara	1 Februari 2015 s/d 1 Februari 2020	S
27	Kantor Cabang Sungailiat	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 132m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 114D, Kel. Srimenanti, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka Induk	16 November 2014 s/d 16 November 2017	S
28	Kantor Cabang Prabumulih	Ruko diatas tanah seluas 314m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih, Sumatera Selatan	1 Oktober 2013 s/d 1 Oktober 2018	S
29	Kantor Cabang Lengkong	Jl. Lengkong Kecil No. 12 B	-	MS
30	Kantor Cabang Salatiga	Ruko di Jl. Diponegoro Ruko Wijaya Square Blok A3, RT 02 RW 05	1 Juni 2013 s/d 31 Mei 2018	S
31	Kantor Cabang Banjarbaru	Ruko di Jl. Ahmad Yani Km. 35 No. 48 Rt003/Rw 002 Kel. Komet Kec. Banjarbaru	1 April 2017 s/d 1 April 2020	S
32	Kantor Cabang Jombang	Ruko di Kompleks Ruko Simpang 3 Blok C1, Jalan Merdeka	1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019	S
33	Kantor Cabang Karawang	Jl. Jend Ahmad Yani No.73 By pass, RT 04 RW 12, Karang Pawitan		MS
34	Kantor Cabang Cikampek	Ruko Sudirman Center Blok A No. 6		MS
35	Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Jend.Sudirman No.14/295, RT.06 Kelurahan Damai		MS
36	Kantor Cabang Bengkulu	Ruko di Jl. Danau No.07 & 08, Kel. Dusun Besar	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
37	Kantor Cabang Tanjung	Ruko di Jl. Ir. P.H.M Noor RT 06, Mabuun	1 April 2013 s/d 31 Maret 2018	S
38	Kantor Cabang Tanjung Pinang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan Km. 08, Kelurahan Air Raja.	1 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2018	S
39	Kantor Cabang Meruya	Ruko di Jl. Lapangan Bola No. 1-1A, Meruya, Kebon Jeruk	29 Juli 2016 s/d 28 Juli 2022	S
40	Kantor Cabang	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-	-	MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
	Palembang	B4, RT. 016 / RW 012,		
41	Kantor Cabang Ketapang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan No.B16, Kel.Sukaharja	19 Maret 2016 s/d 19 Maret 2021	S
42	Kantor Cabang Palembang 2	Ruko di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 020 RW 004, Kel. Alang Alang Lebar, Kec. Alang Alang Lebar, Palembang	1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2018	S
43	Kantor Cabang Gresik	Ruko Green Garden Regency A2- 03 da A2-04, Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas.	15 April 2015 s/d 15 April 2020	S
44	Kantor Cabang Tabanan	Ruko diatas tanah seluas 500 m2 terletak di Jl.Ir. Soekarno, Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan, Bali	2 Juni 2014 s/d 1 Juni 2019	S
45	Kantor Cabang Jakarta Utara	Ruko di Rukan Grand Orchard Square Blok C/20, Jl. Terusan Kelapa Hybrid Sukapura	16 Mei 2013 s/d 15 Mei 2018	S
46	Kantor Cabang Gianyar	Ruko di Jl. By Pass Dharma Giri No. 27	1 April 2016 s/d 1 April 2019	S
47	Kantor Cabang Buleleng	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 85.5 m2 terletak di Jl. Udayana No. 16, Singaraja, Bali	2 Juni 2014 s/d 1 Juni 2019	S
48	Kantor Cabang Pangkalan Balai	Bangunan di Jl. Merdeka No. 9A/B, Kel.Pangkaalan Balai, Kec. Bayuasin III	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
49	Kantor Cabang Batam	Ruko di Komplek Mahkota Raya Blok B No.11, Batam	4 April 2013 s/d 4 April 2018	S
50	Kantor Cabang Magelang	Ruko di Ruko Metro Square F6, Jl. Mayjen. Bambang Soegeng, Mertoyudan	2 Februari 2016 s/d 2 Februari 2021	S
51	Kantor Cabang Manado	Jl. Bethesda no. 18, Kelurahan Ranotana	-	MS
52	Kantor Cabang Pangkal Pinang	Komplek Bangka Square (Ruko no. 2), Jl. Raya Koba KM. 5 No. 17	-	MS
53	Kantor Cabang Tanah Bumbu	Ruko di Jl. Raya Batulicin, RT 3 RW 1, Ds Sejahtera, Kampung Baru	25/04/2013 s/d 26/04/2018	S
54	Kantor Cabang Pasuruan	Bangunan rumah toko 2 lantai dengan luas bangunan 204 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No.40A, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur	1 Januari 2017 s/d 1 Januari 2020	S
55	Kantor Cabang Jakarta Timur	Ruko di Jl. Radin Inten No.8D, Kelurahan Duren Sawit	8 Maret 2013 s/d 7 Maret 2018	S
56	Kantor Cabang Pematang Siantar	Ruko di Jl. Kartini No 48 E, Kel. Timbang Galung	8 April 2016 s/d 8 April 2019	S
57	Kantor Cabang Pringsewu	Ruko di Jl. A. Yani, RT.012 RW.01, Kel. Pringsewu Utara	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
58	Kantor Cabang	Ruko di Ruko The Grand City Blok E, Jl. Letjen R. Suprpto No.	1 Juni 2016	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
	Grobogan	61-63, Purwodadi	s/d 1 Juni 2019	
59	Kantor Cabang Denpasar	Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal	-	MS
60	Kantor Cabang Serang	Ruko di Jl. Raya Pandeglang Lingk. Kebon Jahe, RT. 04/014, Kel. Cipare	8 Januari 2013 s/d 8 Januari 2018	S
61	Kantor Cabang Jember	Rukan di Jl. Diponegoro No.32, Ruko 32B, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur	5 Februari 2016 s/d 5 Februari 2021	S
62	Kantor Cabang Bone	Ruko di Jl. Ahmad Yani RT 000 RW 00 Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan.	1 April 2015 s/d 1 April 2020	S
63	Kantor Cabang Palopo	Ruko di Jl. Kelapa Kec. Wara Kota Palopo	1 Maret 2015 s/d 28 Februari 2020	S
64	Kantor Cabang Padangsidempuan	Ruko di Jl. Sudirman No. 8 F, Kelurahan Losung Batu	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019	S
65	Kantor Cabang Bukit tinggi	Ruko di Jl. Raya Kapas Panji No. 49B, Jambu Air, Nagari Taluak IV Suku	21 November 2015 s/d 21 November 2020	S
66	Kantor Cabang Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal	-	MS
67	Kantor Cabang Sunter	Rukan Puri Mutiara Blok A No. 80, Jl. Utama Griya	-	MS
68	Kantor Cabang Parigi- Moutong	Ruko di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Bantaya	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
69	Kantor Cabang Kotaraya	Ruko di Jl. I Gusti ngurah Rai, Ds. Kotaraya	1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2018	S
70	Kantor Cabang Pangkalan Bun	Ruko di Jl. Pasanah, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kec. Arut Selatn, Kotawaringin Barat, Kalteng.	1 Februari 2017 s/d 1 Februari 2022	S
71	Kantor Cabang Surabaya 2	Ruko seluas 73 m2 yang terletak di Jl. Sentra Darmo Villa Blok A No.6, Surabaya atau dikenal juga sebagai Jl. Raya Darmo Permai Selatan Blok A-06, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020	S
72	Kantor Cabang Surabaya	Jalan Ngagel Jaya Nomor 39, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60283	-	MS
73	Kantor Cabang Bintaro	Ruko di Kebayoran Arcade 2 Blok B1 No.9, Sektor VII, Bintaro Jaya, Tangerang.	5 Februari 2013 s/d 5 Februari 2018	S
74	Kantor Cabang	Ruko di Jl. Panglima Sudirman	1 Januari 2017	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
	Probolinggo	No.188 RT.04 RW.06, Kel. Jati. Kec. Mayangan, Kota Probolinggo	s/d 31 Desember 2019	
75	Kantor Cabang Majalengka	Bangunan di Jl. KH Abdul Halim No.104, Kel Majalengka Kulon	1 April 2013 s/d 1 April 2018	S
76	Kantor Cabang Lahat	Ruko di Jln. Kolonel Burlian NO.95 RT 09 RW 03 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kab. Lahat, Prov. Sumatra selatan	2 Januari 2016 s/d 1 Januari 2019	S
77	Kantor Cabang Bajarmasin	<b>a. Jl. A. Yani Km 8.100 No.1, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,Kalimantan Selatan</b>	-	MS
78	Kantor Cabang Depok	Ruko Margonda Residen No.12A- 14, Jln. Margonda Raya Kav.461 RT/RW. 04/03, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Depok	-	MS
79	Kantor Cabang Bekasi	Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47, Jl Mayor Hasibuan, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi	-	MS
80	Kantor Cabang Bekasi 2	Ruko di Jl. Bulevar Hijau Blok C5 No. 32, Harapan Indah	10 Mei 2016 s/d 10 Mei 2019	S
81	Kantor Cabang Bitung	Ruko di Jl. Wolter Monginsidi No.45 Kel. Grian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung	1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019	S
82	Kantor Cabang Palangkaraya	Ruko di Jalan RTA.Milano Km.3.5 No.6-7 Palangkaraya	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2020	S
83	Kantor Cabang Blitar	Ruko di Jl. Cemara No. 36, Blitar	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
84	Kantor Cabang Cengkareng	Bangunan di Jl. Lingkar Luar Barat, Komplek Sedayu Square Blok C No.2, Kec. Cengkareng, Kel. Cengkareng Barat, Jakarta Barat.	12 Maret 2015 s/d 12 April 2020	S
85	Kantor Cabang Gorontalo	Jl.HB. Jassin (Eks Agus Salim) No. 220 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo	-	MS
86	Kantor Cabang Garut	Ruko diatas tanah seluas 118m2 terletak di Blok Cikurai, Kel. Regal, Garut Kota, Garut	1 Agustus 2014 s/d 1 Agustus 2019	S
87	Kantor Cabang Bekasi 5	Ruko diatas tanah seluas 88 m2 terletak di Perumahan Citragian, Komplek Ciputra Mall R2 No.18, Jl. Alternative Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat	1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020	S
88	Kantor Cabang Jejara	Ruko di Jl. Pemuda No.2, Jejara.	1 Mei 2013 s/d 30 April 2018	S
89	Kantor Cabang	Bangunan rumah toko	1 Maret 2017	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
	Kudus	2 ½ lantai di Kompleks Ruko A. Yani Jl. Ahmad Yani, Ruko Bitingan Indah B-07 dan B-08, Kelurahan Panjunan	s/d 1 Maret 2020	
90	Kantor Cabang Marisa	Ruko di Graha Arwana Jl. Trana Sulawesi, Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato.	12 November 2014 s/d 12 November 2019	S
91	Kantor Cabang Pasaman Barat	Ruko di Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM, Komplek Gunung Tulas, Lintang Selatan, Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua	3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2019	S
92	Kantor Cabang Pandaan	Ruko di Komplek Ruko Pandaan Central Bussiness Kav A3 dan A5, Desa Karangjati, Kecaatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	1 Februari 2016 s/d 1 Februari 2021	S
93	Kantor Cabang Pare-Pare	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 86 m2 terletak di Jl. Sultan Hassanudin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan	24 November 2014 s/d 24 November 2019	S
94	Kantor Cabang Surabaya 4	Rukan 3 ½ lantai di atas tanah seluas 72 m2 di JL. Kalibutih no. 91 A RT09 RW 06 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan	1 Mei 2017 s/d 30 April 2020	S
95	Kantor Cabang Bulungan	Rukan diatas tanah seluas 90 m2 terletak di Jl. Durian No. 87 RT41/RW05 Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara	3 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2020	S
96	Kantor Cabang Penajam Paser Utara	Rukan diatas tanah seluas 180 m2 terletak di Jl. Provinsi, RT10, KM18, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020	S
97	Kantor Cabang Lamongan	Ruko di alan Basuki Rahmat No.203, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.	1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020	S
98	Kantor Cabang Babat	Ruko di Jl. Raya Plaosan (depan Pasar Agrobis), RT 003 RW 003, Kel/Desa Plaosan	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2020	S
99	Kantor Cabang Lubuk Linggau	Ruko di Jl. Yos Sudarso No.48 RT 003 Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuklinggau.	1 Agustus 2015 s/d 1 Agustus 2020	S
100	Kantor Cabang Berau	Ruko di Jl. Durian 1 Ruko No.4 RT 25, Kel. Tanjung Redeb	1 Juni 2016 s/d 30 Mei 2019	S
101	Kantor Cabang Solo	Ruko di Jalan RM Said Nomor: 160C RT 2 RW 3, Surakarta	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2021	S
102	Kantor Cabang Bandar Jaya	Ruko di Jl. Proklamator Raya No. 28 -29, Bandar Jaya	1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2021	S
103	Kantor Cabang Sragen	Ruko di Jl. Sukowati No. 170, Sragen	1 Mei 2015 s/d 30 April 2018	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
104	Kantor Cabang Cawang	Jalan Dewi Sartika No.292 F, RT 004 RW 005, Kec. Kramat Jati, Kel. Cawang.	1 Maret 2013 s/d 1 Maret 2018	S
105	Kantor Cabang Mamuju	Ruko di Jl. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Karema	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019	S
106	Kantor Cabang Denpasar Sudirman	<b>b. Komp.Sudirman Agung Blok C/ No.8</b> Jl.PB Sudirman, Panjer Denpasar	-	MS
107	Kantor Cabang Bekasi 4	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 100 m2 terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 233 desa Tambun, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat	1 September 2017 s/d 31 Agustus 2022	S
108	Kantor Cabang Baturaja	Bangunan di Dr Moh Hatta, RT 004 RW 04, Desa Suka Karya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu.	1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018	S
109	Kantor Cabang Banjarnegara	Rukan di Jalan S. Parman No.28 RT 01/RW 04 Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019	S
110	Kantor Cabang Denpasar 3	Bangunan di Jl. Imam Bonjol, Komplek Imam Bonjol Square 555 A6, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat.	30 Mei 2013 s/d 30 Mei 2018	S
111	Kantor Cabang Poso	Jalan Pulau Sumba No. 7, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah	-	MS
112	Kantor Cabang Sukabumi	Ruko di Jl. KH. Sanusi No.46 C, Ciseureuh	28 Januari 2013 s/d 28 Januari 2018	S
113	Kantor Cabang Pekalongan	Ruko di Jl. Dr. Cipto No. 22D	12 April 2015 s/d 12 April 2020	S
114	Kantor Cabang Kolaka	Ruko di Jl. Dr. Sutomo No. 51, Kel. Lamokato	14 Juni 2015 s/d 14 Juni 2018	S
115	Kantor Cabang Kotamobagu	Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Kotamobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu 95711 Sulawesi Utara	-	S
116	Kantor Cabang Bayuwangi	Ruko di Jl. S. Parman No. 131D	1 November 2017 s/d 1 November 2022	S
117	Kantor Cabang Tuban	Ruko di Jl. Letda Sucipto No.5A, Desa Perbon, Kabubapten Tuban, Propinsi Jawa Timur	9 Maret 2015 s/d 9 Maret 2020	S
118	Kantor Cabang Hulu Sungai Tengah	Ruko diatas tanah seluas 495m2 terletak di Jl. Murakarta No. 8C RT 5 Desa Bukat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2019	S
119	Kantor Cabang Sangatta	2 Unit Ruko 5 lantai diatas tanah seluas 2100 m2 terletak di Jl. Pendidikan Dalam, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kalimantan TImur	1 April 2014 s/d 1 April 2019	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
120	Kantor Cabang Sintang	2 Unit Ruko 5 lantai diatas tanah seluas 2100 m2 terletak di Jl. Pendidikan Dalam, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kalimantan TImur	1 Maret 2014 s/d 28 Februari 2019	S
121	Kantor Cabang Sampit	Jln. Jendral Sudirman Km. 1.5 No. 19 RT 43/RW.8 Kec. Mentawa Baru Ketapang Kel. Mentawa Baru, Hulu Sampit, Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur 74322	-	MS
122	Kantor Cabang Subang	Ruko di Jl. Kapten Hanafiah, RT. 98/97, Blok B No.4, Kel. Karanganyar	1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2018	S
123	Kantor Cabang Bandar Lampung	Jl. Gajah Mada No.55, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 35121	-	MS
124	Kantor Cabang Kediri 2	Rukan diatas tanah seluas 54 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 114, RT 16, RW 01, Pare, Kediri, Jawa Timur	17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2020	S
125	Kantor Cabang Malang	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 217m2 terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 148, Blimbing, Malang, Jawa Timur	10 Agustus 2014 s/d 10 Agustus 2019	S
126	Kantor Cabang Karimun	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 186m2 terletak di JIAhmad Yani, RT 005/RW 001, Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, KEPRI	18 September 2014 s/d 18 September 2017	S
127	Kantor Cabang Asahan	Rukan diatas tanah seluas 128m2 terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 48 E Ling. III, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara	1 November 2014 s/d 1 November 2017	S
128	Kantor Cabang Karo	Rukan diatas tanah seluas 135m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara	1 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2020	S
129	Kantor Cabang Bojonegoro	Ruko di Jl. M.H. Thamrin 103, Bojonegoro	15 Juni 2016 s/d 15 Juni 2021	S
130	Kantor Cabang Muara Bungo	Rukan di Jl. Sudirman RT 003 RW 001, No.45-46, Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo.	1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018	S
131	Kantor Cabang Kendal	Ruko di atas tanah seluas 190 M2 terletak di Jl. Lingkar Pasar 1 No.1 RT.03 RW.02, Kelurahan Pekauman	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2020	S
132	Kantor Cabang Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km 9,5Kel. Remu Selatan, DistrikSorongTimur, Kota Sorong, Papua Barat	-	MS
133	Kantor Cabang Pontianak	Ruko diJl. M. Sohor No.45 RT.05 RW.02, KelurahanAkcaya	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2020	S
134	Kantor Cabang Yogyakarta	Ruko Monjali Permai Kav.2, Jl. Monjali Sinduad	1 April 2013 s/d 1 April 2018	S
135	Kantor Cabang Ponorogo	Ruko di Jl. Soekarno-Hatta No.238, Kel. Banyudono, Kec.	1 Maret 2013 s/d	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
		Ponorogo.	1 Maret 2018	
136	Kantor Cabang Kendari	Yunus, Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara	-	MS
137	Kantor Cabang Malang 2	2 unit Ruko diatas tanah seluas 144m2 terletak di Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kepanjen Bussines Center A 11 – A 12	2 Juli 2014 s/d 2 Juli 2019	S
138	Kantor Cabang Tulang Bawang	Ruko di Jl. Lintas Timur Sumatera, Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya	1 Oktober 2015 s/d 30 September 2018	S
139	Kantor Cabang Madiun	Bangunan Jl. Serayu Timur No.144 RT 043 RW 015, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun	1 September 2015 s/d 1 September 2020	S
140	Kantor Cabang Rimbo Bujang	Ruko di Jl. Pahlawan No. 3, Kel. Wirotho Agung	1 November 2016 s/d 30 November 2021	S
141	Kantor Cabang Tahuna	Rukp di Jl. Raramenusa, Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan III	20 JanuRI2013 s/d 20 Januari 2018	S
142	Kantor Cabang Bolaang Mongondow	Ruko di Jalan Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26	3 Mei 2016 s/d 2 Mei 2019	S
143	Kantor Cabang Purwokerto	Ruko di Jl. Gerilya Timur No.35, Ruko No.3, Kel. Teluk	1 Maret 2013 s/d 28 Februari 2018	S
144	Kantor Cabang Surabaya 3	Ruko di Jl. Soka 21-C, RT.004 RW.007, Kec. Tambaksari, Kel. Tambaksari, Surabaya	7 Oktober 2016 s/d 22 Oktober 2019	S
145	Kantor Cabang Sidoarjo	Ruko di Kompleks Ruko Gateway No. B/2, Jl. Raya Waru (Aloha), Sidoarjo, 61256	1 oktober 2013 s/d 1 Oktober 2018	S
146	Kantor Cabang Tangerang 2	Komplek Balaraja Ultimate For Business Retail Nomor 3 A, Jalan Raya Serang Km 24, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten		MS
147	Kantor Cabang Tobelo	Jl. Kemakmuran, Ds. Rawajaya, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	-	MS
148	Kantor Cabang Rembang	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 445m2 terletak di Jl. Pemuda No. 3B, Kel. Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah	27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2018	S
149	Kantor Cabang Semarang	Ruko Mataram Plaza Blok D No.3, Jl.MT Haryono, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50136	-	MS
150	Kantor Cabang Dharmasraya	Ruko di Jl. Lintas Sumatera, Jorong Pasar Koto Baru	21 Mei 2016 s/d 21 Mei 2019	S
151	Kantor Cabang Tangerang 3	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 34 m2 terletak di Taman Kutabumi Blok B 16No. 22 dan 23, Kutabumi, Pasar Kemja, Tangerang	3 Nopember 2014 s/d 3 Nopember 2017	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
152	Kantor Cabang Bau Bau	Ruko diatas tanah seluas 1.622 m2 terletak di Jl. Bataguru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara	1 Oktober 2014 s/d 1 Oktober 2019	S
153	Kantor Cabang Gowa	Ruko diatas tanah seluas 150 m2 terletak di Jl. Poros Parangga, Mangali, Palingga, Gowa	24 November 2014 s/d 24 November 2019	S
154	Kantor Cabang Makassar 2	Rukan diatas tanah seluas 99 m2 terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 18-19, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	1 Desember 2013 s/d 1 Desember 2018	S
155	Kantor Cabang Toli-Toli	Ruko di Jl. Magamu No. 63, Kelurahan Baru.	1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2019	S
156	Kantor Cabang Kediri	Ruko di Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No.8, Jl. Hayam Wuruk Kediri	1 Agustus 2017 s/d 1 Agustus 2020	S
157	Kantor Cabang Ambon	Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07, Jln. WolterMonginsidi, KelurahanLateri, KecamatanBaguala, Ambon	-	MS
158	Kantor Cabang Konawe	Bangunan di Jl. Poros KDI-KLK Tumpas, Unaaha	1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018	S
159	Kantor Cabang Belitung	Bangunan di Jl. Jen. Sudirman No.32 RT 09 RW 04, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung.	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020	S
160	Kantor Cabang Kebumen	Rukan di Jl. Kutoarjo D3, PERUM Mahardika 2, Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2019	S
161	Kantor Cabang Bandung 3	Ruko diatas tanah seluas 100m2 terletak di Ruko Soreang Square Blok B Nomor 10 Jl. Raya Soreang, Bandung	28 Oktober 2017 s/d 28 Oktober 2020	S
162	Kantor Cabang Paser	Ruko di Jl. R.A.Kartini No.21A, RT.13/RW.4, Kel.Tanah Grogot, Kab.Paser, Kalimantan Timur	1 April 2016 s/d 31 Maret 2019	S
163	Kantor Cabang Cimahi	Ruko di Jl. Jend.H. Amirmachmud No.572, RT.002 RW.001, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat	1 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2019	S
164	Kantor Cabang Palu	Rukan Moh. Hatta Center, Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21 D-E, RT 11/RW 03, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, 94111	-	MS
165	Kantor Cabang Binjai	Ruko di Kompleks Ruko Surya Permai, Jl. T. Amir Hamzah No. 1L	5 Mei 2015 s/d 5 Mei 2020	S
166	Kantor Cabang Samarinda Seberang	Ruko di Ruko Sentra Samarinda Seberang nomor 15, Jl Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang	10 Oktober 2016 s/d 10 Oktober 2019	S
167	Kantor Cabang Luwu Timur	Ruko di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sidoarjo, Desa Beringin Jaya	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
168	Kantor Cabang Pamulang	Ruko diatas tanah seluas 176 m2 terletak di Jl. Raya Siliwangi No. 57 G RT01/RW07, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan	2 April 2015 s/d 1 April 2020	S
169	Kantor Cabang Kuningan	Ruko diatas tanah seluas 558 m2 terletak di Jl. RE Martadinata No. 53A RT 017/ RW 003, Cijobo, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan	1 Desember 2014 s/d 30 November 2017	S
170	Kantor Cabang Tasikmalaya	Bangunan di Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A, Jl. H.Z. Mustofa, Tasikmalaya	6 November 2012 s/d 5 November 2017	S
171	Kantor Cabang Polewalimandar	Ruko di Jl. H Andi Depu Ruko Taman Asri No.1, Kel. Takkatidung	2 Mei 2016 s/d 2 Mei 2019	S
172	Kantor Cabang Klaten	Rukan diatas tanah seluas 143 m2 terletak di Jl. Veteran No. 256A, Klaten	1 Oktober 2014 s/d 30 September 2019	S
173	Kantor Cabang Ternate	Ruko diatas tanah seluas 450m2 terletak di Jl. Stadion No. 8 Kel Kampung Pisang, Kec. Ternate Selatan, Ternate, Maluku	1 September 2016 s/d 1 September 2021	S
174	Kantor Cabang Muaro Jambi	Ruko di Jl. Lintas Timur RT 16 RW 02, Kel. Sengati, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi	1 April 2015 s/d 1 April 2018	S
175	Kantor Cabang Sidoarjo Mojopahit	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 114m2 terletak di Jl. Mojopahit No. 32 B (dahulu no. 7), Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur	31 Mei 2014 s/d 31 Mei 2019	S
176	Kantor Cabang Jambi	Jl.Hayam Wuruk No.81, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi	-	MS
177	Kantor Cabang Mamuju Utara	Ruko, di Jalan Ir. Soekarno Kel Pasangkayu, Kec. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat.	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S
178	Kantor Cabang Tenggara	Ruko di Jl. Patin No. 99 B, Tenggara, Kutai Kertanegara	1 Juli 2014 s/d 31 Juni 2019	S
179	Kantor Cabang Tarakan	Ruko di Jl. Gajah Mada No. 75, Kel. Karang Anyar Pantai	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020	S
180	Kantor Cabang Manokwari	Jl. Trikora Wosi, RT.003 RW. 007, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat	-	MS
181	Kantor Cabang Tegal	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No. 20, Ruko 3-4, RT/RW. 002/XI Komplek Nirmla Estate Tegal, Desa Mintaragen	15 Agustus 2015 s/d 15 Agustus 2020	S
182	Kantor Cabang Air Molek	Ruko di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sekar Mawar	20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2019	S
183	Kantor Cabang Indramayu	2 Bangunan Ruko 2 lantai di atas tanah 90 M2 Jl. Raya Sleman No.3B RT.01 RW.03, Desa Sleman Lor, Kec. Sliyeng, Kab.	1 Januari 2017 s/d	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
		Indramayu, Jawa Barat.	7 Maret 2020	
184	Kantor Cabang Bagan Batu	Ruko di Jl. Jendral Sudirman, Desa Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir	16 Agustus 2015 s/d 16 Agustus 2020	S
185	Kantor Cabang Tulung Agung	Ruko di Jl. WR. Supratman No. 103, Kab. Tulung Agung	1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	S
186	Kantor Cabang Mojokerto	Bangunan rumah dan toko (ruko) 2 lantai di ruko Kranggan Permai A 05-06, Jl. Pahlawan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto	1 November 2016 s/d 1 November 2018	S
187	Kantor Cabang Tomohon	Ruko di Kel. Walian Lingk VI Kec. Tomohon Selatan.	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2019	S
188	Kantor Cabang Luwuk	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No.15 Luwuk.	15 September 2017 s/d 15 September 2020	S
189	Kantor Cabang Cirebon	Jalan Tuparev No. 115 A Blok Siwungu RT/RW. 001/001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	-	MS
190	Kantor Cabang Jakarta Corporate	Bangunan di Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No.31 Jl. Let.jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	1 Maret 2016 s/d 28 Februari 2019	S
191	Kantor Cabang Bontang	Ruko di Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16 F, Ruko Primagama	1 Agustus 2013 s/d 31 Juli 2018	S
192	Kantor Cabang Minahasa Selatan	Ruko di Lingkungan IV Kel.Uwuran I, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan.	10 Juni 2013 s/d 10 Juni 2018	S
193	Kantor Cabang Pekanbaru	Jalan Soekarno Hatta No. 88, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	-	MS
194	Kantor Cabang Pekanbaru 3	Jl.Setiabudi No.89-89A, Pekanbaru, Riau	-	MS
195	Kantor Cabang Jayapura	Ruko diatas tanah seluas 115m2 terletak di Jl. Kelapa Dua, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Jayapura, Papua	1 November 2013 s/d 31 Oktober 2018	S
196	Kantor Cabang Merauke	Ruko Parko No.03 di Jl. Parakomando RT.001 RW.001 Kel. Mandala, Kec. Merauke Kab.Merauke, Papua	17 Juli 2016 s/d 16 Juli 2019	S
197	Kantor Cabang Cilegon	Ruko, di Jl.Achmad Yani No.135, Kel.Sukmajaya, Kec.Jombang, Cilegon, Banten	10 Maret 2015 s/d 10 Maret 2018	S
198	Kantor Cabang Jakarta Selatan Dua	Ruko, terletak di Jl. Rawa Bambu Raya No. 18, Rt.013/Rw.005, Kel.Pasar Minggu, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan	11 April 2015 s/d 10 April 2020	S
199	Kantor Cabang Pelalawan	Rukan, terletak di Jl.Maharaja Indra Belakang Rt.01/Rw.09, Kel.Pangkalan Kerinci, Kec.Pangkalan Kerinci,	9 Juni 2015 s/d 9 Juni 2020	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Jenis Gedung
		Kab.Pelalawan, Riau		
200	Kantor Cabang Kupang	Rukan, terletak di Jl. Frans Seda Rt.042/Rw.013, Kel.Fatululi, Kec.Oebobo, Kupang	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2018	S
201	Kantor Cabang Toraja	Ruko di Jl. Poros Makale - Rantepao No. 474 A, Kel. Tambunan	1 Desember 2014 s/d 1 Desember 2019	S
202	Kantor Cabang Bandung 4	Ruko, di Kota Bandung, Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Wetan, Jalan Jend. A.H Nasuiton, Komplek Tripoint Bandung Blok B5 No.10	18 Maret 2016 s/d 17 Maret 2019	s
203	Kantor Cabang Serpong-Tangerang	Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322	-	MS
204	Kantor Cabang Bandung 5	Ruko di Jl. Sari Asih Raya No.12 RT.06 RW.09, Kel.Sarijadi, Kec.Sukasari, Bandung, Jawa Barat	1 September 2016 s/d 1 September 2019	S
205	Kantor Cabang Bogor 2	Ruko di Jl. Abdullah Bin Nih No.218, Ruko Taman Yasmin Sektor 6, Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat	1 Oktober 2016 s/d 30 September 2019	S
206	Kantor Cabang Mataram 2	Ruko di Jl. Selaparang Sweta, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Mataram, NTB	6 September 2016 s/d 6 September 2019	S
207	Kantor Cabang Cilacap	Ruko Dualima Jaya No.7, RT.02 RW.02 Jl. Suprpto, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Jawa Tengah	1 Desember 2016 s/d 31 November 2019	S
208	Kantor Cabang Cirebon 2	Ruko di Jl. Prabu Kansantang RT.001 RW.08, Desa Sukadana, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, Jawa Barat	1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019	S
209	Kantor Cabang Sumbawa	Ruko di Jl. Diponegoro No.63 RT.02 RW.10, Kab. Sumbawa, Kel. Bugis, NTB	21 September 2016 s/d 21 September 2019	S
210	Kantor Cabang Sidoarjo 3	Ruko La Vida Junction Nomor 00369 Jalan Gubernur Sunandar 136-138 RT.01 RW.01 Kel.Sidomulyo, Kec.Krian, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur.	25 November 2016 s/d 25 November 2019	S
211	Kantor Cabang Yogyakarta 2	Jalan Gedongkuning No.110, RT 035, Kel.Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019	S

1. Berdasarkan Surat OJK No. S-278/NB.11/2017 pada tanggal 3 April 2017 perihal Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang Penutupan Kantor Cabang Barito Utara telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB
2. Berdasarkan Surat OJK No. KEP-125/NB.111/2017 pada tanggal 18 Agustus 2017 perihal Keputusan OJK atas Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Surabaya 4 dan telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB

### 13. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

#### Kolektibilitas Piutang

##### Piutang Macet (*Non-Performing Loan*)

Piutang Macet atau NPL (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Rasio piutang macet dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 30 Juni 2017 meningkat sebesar 0,18% ke angka 1,09% dibandingkan 0,91% pada tahun 2016. Penyebab peningkatan rasio piutang macet terhadap piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan tahun sebelumnya berkorelasi dengan meningkatnya

jumlah piutang. Selain itu kenaikan ini juga disebabkan oleh dampak perlambatan ekonomi dan biaya kredit yang lebih tinggi pada pusat bisnis komoditas seperti di Kalimantan.

Sepanjang periode enam bulan tahun 2017, Perusahaan melakukan pembenahan tim penagihannya, meningkatkan pengawasan kredit dan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

#### Tabel Kolektibilitas Piutang

Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPL	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	0,93%	0,75%
Pembiayaan Konsumen	1,31%	1,11%
<b>Jumlah</b>	<b>1,09%</b>	<b>1,91%</b>

\* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini menunjukkan piutang macet Perseroan:

#### Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan

Uraian	<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Sewa pembiayaan	77,6	53,8
Pembiayaan Konsumen	80,3	64,7
<b>Jumlah</b>	<b>157,9</b>	<b>118,5</b>

#### Penghapusan Piutang (*Loan Write-Off*)

Selama periode enam bulan pada tahun 2017, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami penurunan rasio sebesar 0,71% dari 2,15% di tahun 2016 menjadi 1,44%, penurunan rasio penghapusan piutang ini terjadi pada produk sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

#### Tabel Penghapusan Piutang

Penghapusan Piutang	<i>(dalam persentase)</i>	
	30 Juni 2017 <sup>^</sup>	31 Desember 2016
Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	0,9	1,5
Pembiayaan Konsumen	2,2	3,0
<b>Jumlah</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>
Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Bersih)**		
Sewa Pembiayaan	0,9	1,5
Pembiayaan Konsumen	2,4	3,6
<b>Jumlah</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>

\*Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

\*\* Piutang Bersih adalah piutang pada laporan posisi keuangan

<sup>^</sup> Disetahunkan

#### 14. Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Coverage*)

Jumlah kecukupan penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar 1,7x dimana tahun sebelumnya sebesar 1,5x. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi potensi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari piutang-piutang tidak tertagih.

#### Tabel Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	30 Juni 2017	31 Desember 2016
<b>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</b>		
Sewa Pembiayaan	108,1	60,3
Pembiayaan Konsumen	156,5	122,7

<b>Jumlah</b>	<b>264,6</b>	<b>183,0</b>
<b>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (% dari Piutang Dikelola)</b>		
Sewa Pembiayaan	1,3	0,8
Pembiayaan Konsumen	2,5	2,1
<b>Jumlah</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>
<b>Kecukupan Pencadangan (terhadap Piutang Dikelola)</b>		
Sewa Pembiayaan	1,4	1,1
Pembiayaan Konsumen	2,0	1,9
<b>Jumlah Kecukupan Pencadangan</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>

## 15. Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (*gearing ratio*). Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat memadai. Dalam hal *gearing ratio*, maksimal yang diperbolehkan sesuai dengan PMK adalah 10 kali, namun per 30 Juni 2017, *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah maksimal yang diatur dalam PMK yaitu sebesar 2,0x. Selanjutnya menyangkut modal disetor, jumlah modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau mengajukan izin perubahan pemegang saham. Per 30 Juni 2017, besarnya modal sendiri yang dimiliki Perseroan adalah diatas Rp4 triliun, dan jauh diatas jumlah minimum yang diatur di PMK tersebut.

### Tabel Utang Bersih Terhadap Ekuitas

	<b>30 Juni 2017</b>
Rasio Utang Bersih Terhadap Ekuitas	2,0x

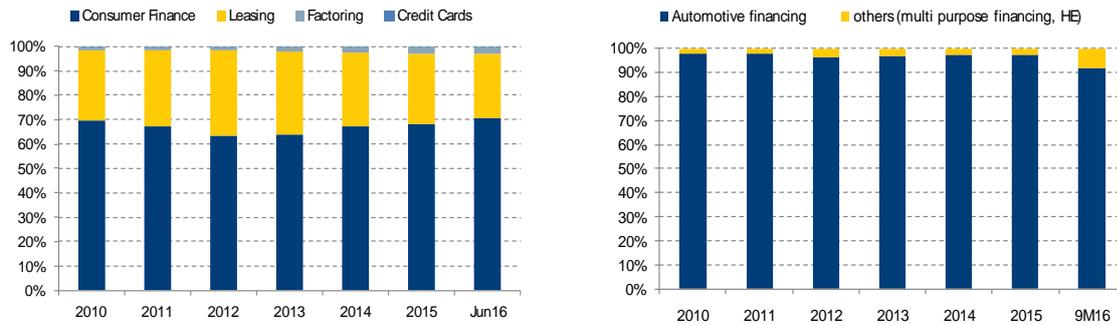
## 16. Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan saat ini didukung oleh stabilnya permintaan pembiayaan kendaraan di Indonesia. Sejak 2012 hingga 2015, jumlah aset seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan telah tumbuh sebesar 46%. Selain itu, sektor pembiayaan di Indonesia didominasi oleh 20 perusahaan pembiayaan terbesar mengingat 51% pangsa pasar dikuasai oleh 20 perusahaan tersebut. Perseroan, hingga Desember 2016 menempati peringkat ke delapan dari seluruh perusahaan pembiayaan, berhasil meningkatkan jumlah asetnya dengan pertumbuhan pendapatan salah satu yang terbesar hingga CAGR 20% sejak tahun 2012 hingga 2016 (Sumber: Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan). Lini bisnis Perseroan saat ini mencakup pasar yang luas, meliputi pinjaman yang diberikan kepada pribadi maupun korporasi.

Berdasarkan segmentasi bisnis, sekitar 97% dari total pembiayaan di industri didominasi oleh pembiayaan konsumen dan *leasing*, dimana per tanggal 30 September 2016, sekitar 90% dari total pembiayaan pinjaman yang diberikan adalah pembiayaan untuk sektor otomotif.

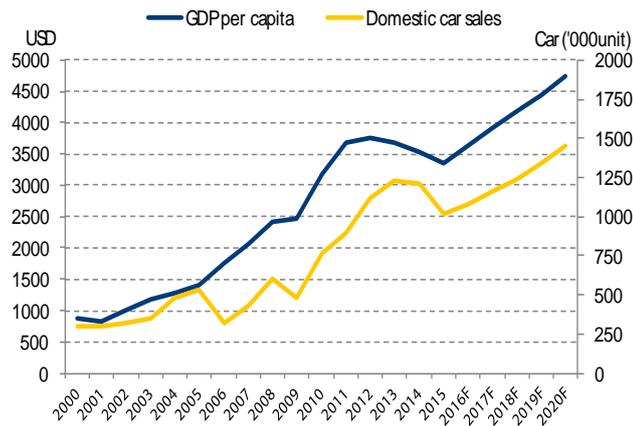
Pembiayaan Berdasarkan Segmen

Pembiayaan Berdasarkan Sektor



Sumber: Bank Indonesia, Perseroan

Menurut IMF, pendapatan domestik bruto per kapita diperkirakan akan meningkat pada tahun 2017 dan mencapai hingga USD4.000 pada tahun 2018. Hal ini tentunya dapat memicu tingkat penjualan kendaraan bermotor yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan.



Sumber: Estimasi IMF, GAIKINDO

Sektor pembiayaan akan tetap memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan masih rendahnya tingkat kepadatan mobil penumpang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Brunei, Malaysia, Singapura dan Thailand.

## VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 No. 22 tanggal 19 Oktober 2017 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi") berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum tahap ketiga dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah), dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)			Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi)	335.000.000.000	100.000.000.000	400.000.000.000	835.000.000.000	100,00
<b>Total</b>		<b>335.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>835.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7"). Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM yaitu kesamaan 1 (satu) Komisaris pada Susunan Komisaris.

## VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

### A. WALI AMANAT OBLIGASI

Sehubungan dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 No. 20 tanggal 19 Oktober 2017 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah terdaftar di Bapepam dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 ini, BTN telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan memberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi telah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4 sesuai dengan Surat Pernyataan No. 367/IBD/CM/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017; dan
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi dan menyatakan, sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi, (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Obligasi yang diwalianati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3; (iii) tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3; dan (iv) tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Surat Pernyataan No. 366/IBD/CM/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

#### 1. Umum

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikan bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan

anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka.

## 2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dengan Surat No. DE/X/2017-7687 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Bulanan terkait salah satunya Komposisi Pemilikan Surat Saham per 30 September 2017, susunan pemegang saham BTN adalah sebagai berikut :

Struktur Permodalan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>20.478.432.000</b>	<b>10.239.216.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	1	1	0,00
- Saham Seri B			
1. Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.177.000.000.000	60,00
2. Maryono (Direktur Utama)	98.500	49.000.000	0,00
3. R. Mahelan Prabantarikso (Direktur)	64.000	32.000.000	0,00
4. Masyarakat	4.235.837.500	2.117.919.000.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.590.000.000</b>	<b>5.295.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>9.888.432.000</b>	<b>4.944.216.000.000</b>	

## 3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.89 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0151355 tanggal 10 Juli 2017 ("Akta PKR No.89/2017), adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Wayan Agus Mertayasa;
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam;
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi;
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata;*)
Komisaris Independen	: Garuda Wiko;
Komisaris	: Sumiyati;
Komisaris	: Maurin Sitorus;
Komisaris	: Iman Sugema.

\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### Direksi

Direktur Utama	: Maryono;
Direktur	: Iman Nugroho Soeko;
Direktur	: Adi Setianto;
Direktur	: Oni Febriarto Rahardjo;
Direktur	: Handayani;
Direktur	: R. Mahelan Prabantarikso;

Direktur : Nixon L.P. Napitupulu;  
Direktur : Budi Satria.

#### 4. Jaringan Operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Wali amanat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi Bank yang Terdepan dalam Pembiayaan Perumahan”, dan misi antara lain memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah, serta meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakan program perumahan untuk rakyat.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi the world class company dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, dan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut. Bank BTN telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010, yang difokuskan pada 3 segmen usaha berbeda, yaitu segmen consumer, commercial dan Syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Layanan consumer banking Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Consumer banking juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan commercial banking Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### 5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus meluas, sehingga sampai dengan tanggal 30 September 2017 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah memiliki 1 Kantor Pusat, 5 Kantor Wilayah, 71 Kantor Cabang, 243 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 478 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 23 Kantor Cabang Syariah, 36 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 6 Kantor Kas Syariah, 10 Mobil Kas Keliling, 1.951 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

#### 6. Dalam Pengembangan Pasar Modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

##### a. Wali Amanat (Trustee):

Obligasi VIII PT PLN (Persero)  
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016  
Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016  
Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap II Tahun 2016  
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016  
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016  
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016  
Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013  
Obligasi Berkelanjutan II Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2016  
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016  
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017

Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017  
 Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017  
 Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

**b. Agen Pemantau:**

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III tahun 2015  
 Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017

**7. Laporan Keuangan Wali Amanat**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

**Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi**

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2017	2016	2015
<b>ASET</b>			
Kas	1.249.782	1.006.682	1.181.219
Giro pada Bank Indonesia	11.602.593	10.697.378	10.986.351
Giro pada bank lain – neto	591.296	321.306	201.361
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	7.857.212	17.581.350	7.839.477
Efek-efek- neto	9.616.151	4.171.700	1.807.561
Obligasi Pemerintah	8.382.372	9.243.639	8.230.908
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	159.741.770	148.497.025	126.006.434
Pembiayaan/piutang syariah – neto	175.178.685	162.330.347	136.905.226
Aset pajak tangguhan – neto	139.428	102.791	-
Aset tetap – neto	4.707.632	4.659.379	1.553.401
Bunga yang masih akan diterima	1.989.494	1.864.829	1.548.489
Aset lain-lain	2.732.915	2.189.078	1.553.599
<b>Total Aset</b>	<b>224.066.811</b>	<b>214.168.479</b>	<b>171.807.592</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas segera	3.774.180	2.081.886	1.960.789
Simpanan dari nasabah	157.757.084	159.987.717	127.708.670
Simpanan dari Bank Lain	8.717.982	3.652.735	1.721.198
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.967.969	1.385.000	2.135.091
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	15.031.552	14.919.910	12.492.202
Pinjaman yang diterima	7.648.742	4.999.616	7.726.728
Bunga yang masih harus dibayar	422.762	382.551	357.364
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-	9.566
Liabilitas lain-lain	4.876.534	4.629.410	3.835.877
<b>Total Liabilitas</b>	<b>204.215.337</b>	<b>195.037.943</b>	<b>157.947.485</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.291.173
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.046.598
Opsi Saham	-	-	2.690
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	-	(115.567)	(133.690)
Kerugian pengukuran kembali	(87.771)	(78.546)	(106.144)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	2.966.991	-
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	8.227.683	6.232.559	4.751.833
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.427.820	2.775.645	2.007.647
<b>Total Ekuitas</b>	<b>19.851.474</b>	<b>19.130.536</b>	<b>13.860.107</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>224.066.811</b>	<b>214.168.479</b>	<b>171.807.592</b>

## Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2017	2016	2015
Pendapatan bunga dan bagi hasil	8.982.588	17.138.819	14.966.209
Beban bunga dan bonus	(4.820.687)	(8.975.274)	(8.155.133)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	4.161.901	8.163.545	6.811.076
Pendapatan operasional lainnya	782.788	1.282.822	1.106.526
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(369.116)	(707.531)	(901.008)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	7.198
Beban operasional lainnya	(2.934.541)	(5.386.604)	(4.490.187)
<b>Laba Operasional</b>	<b>1.641.032</b>	<b>3.352.232</b>	<b>2.533.605</b>
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(4.107)	(22.148)	8.281
Laba sebelum manfaat pajak	1.636.925	3.330.084	2.541.886
Manfaat (beban) pajak			
Kini	(365.845)	(711.179)	(690.979)
Tangguhan	-	-	-
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>1.271.080</b>	<b>2.618.905</b>	<b>1.850.907</b>
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(26.361)	3.012.712	(39.570)
<b>Laba komprehensif selama tahun berjalan</b>	<b>1.244.719</b>	<b>5.631.617</b>	<b>1.811.337</b>
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	120	247	175

**Alamat Wali Amanat**  
**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
 Menara BTN lantai 18  
 Jl. Gajah Mada No. 1  
 Jakarta 10130, Indonesia  
 Tel: (62 21) 6336 789 ext. 1844 - 1847  
 Up. Institutional Banking Division  
 Email : trustee.btn@gmail.com  
 Website : www.btn.co.id

### B. WALI AMANAT OBLIGASI BERKELANJUTAN III BFI FINANCE INDONESIA TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)

Untuk Obligasi Berkelanjutan III BFIN Tahap IV dan/atau selanjutnya (jika ada), Perseroan akan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat yang akan menandatangani perjanjian perwalianamanatan untuk setiap tahap penerbitan obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

## VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-031/OBL/KSEI/1017 tanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 9 November 2017. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

### 4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 5. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2017 dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 November 2017 pukul 16.00 WIB.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab IX Informasi Tambahan ini pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 7 November 2017.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 8 November 2017 (*in good fund*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bank Central Asia Tbk  
Cabang KH Mas Mansyur  
No. Rekening: 179-303-0707

Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia  
Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 November 2017. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai Hari Kerja pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum sebelum periode 2 (dua) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum diambil, Perseroan wajib: menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum kepada OJK disertai

---

dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
2. situs web Perseroan.  
Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

### **13. Lain-Lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

---

## **IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum Obligasi di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2924 9088  
Faksimili: (021) 2924 9168  
[www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)

---

**X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**